

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata telah berkembang menjadi suatu sistem multidimensi dengan berbagai aspek yang saling terkait serta saling mempengaruhi satu sama lainnya. Keberadaannya ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan dunia yang mengakomodasi beragam upaya perubahan secara terencana pada masyarakat. Hal tersebut tidak lain karena pengaruhnya yang cukup kuat hingga membawa kebermanfaatan bagi suatu pembangunan, baik itu dalam bidang ekonomi maupun bidang perubahan sosial-budaya lainnya.¹ Seperti yang dinyatakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia atau *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO, 2021) bahwa jutaan pekerjaan dan bisnis di negara-negara di seluruh penjuru dunia kini bergantung pada sektor pariwisata. Keadaan tersebut diperkuat oleh laporan UNWTO yang menyoroti perkembangan pariwisata dalam satu dasawarsa terakhir, dimana sektor tersebut telah membuktikan eksistensinya sebagai kekuatan global yang mendorong kemajuan sosial-ekonomi secara signifikan.²

Pada perkembangannya, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia juga tidak luput dari masifnya upaya pengembangan potensi sumber daya pariwisata mulai dari level nasional hingga pada level akar-rumput. Usaha nyata pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata tersebut termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional sub-poin keenam, yakni pariwisata sebagai motor untuk mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Usaha nyata pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata pun terus berlanjut. Hal ini tampak pada poin pertama agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, yang menyebutkan

¹ Irianto, J. (2017). Policies and Tourism Branding. *Prosiding Semnasfi Universitas Muhammad Sidoarjo*, 1(1): 1-12.

² UNWTO. (2021). *International Tourism Highlights, 2020 Edition*.

bahwa pembangunan ekonomi akan terus dipacu untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah di bidang pariwisata.

Untuk menindaklanjuti akan adanya urgensi tersebut, berbagai langkah dan kebijakan pun terus dicanangkan oleh pemerintah untuk menggiatkan pengembangan sektor pariwisata, mulai dari optimalisasi pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, hingga penguatan kelembagaan kepariwisataan.³ Hal tersebut dilakukan menyadari bahwa potensi sumber daya yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia dinilai mampu menghasilkan peluang yang cukup strategis untuk menarik minat wisatawan, baik itu wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia telah mencatat kondisi makro kepariwisataan nasional yang menunjukkan adanya tren perkembangan sektor pariwisata secara positif dari tahun 2015 hingga tahun 2019 seperti yang tercermin pada tabel I.1 sebagai berikut.

Tabel I.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Penerimaan Devisa, dan Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional Tahun 2015-2019

Tahun	Kunjungan Wisman		Penerimaan Devisa (Miliar USD)	Kontribusi Terhadap PDB Nasional
	Jumlah	Pertumbuhan		
2015	10.406.759	10,29 %	10,8	4,25 %
2016	11.519.275	10,69 %	11,2	4,13 %
2017	14.039.799	21,88 %	13,1	4,11 %
2018	15.810.305	12,61 %	16,4	4,5 %
2019	16.106.954	1,88 %	16,9	4,8 %

Sumber: Data diolah dari Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 dan Statistik Wisatawan Mancanegara (<https://kemenparekraf.go.id/>)

³ Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024.

Berdasarkan data dalam tabel I.1 tersebut, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisman di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Pun demikian dengan sumbangan sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa negara yang terus meningkat setiap tahunnya. Kemenparekraf dalam hal ini menyebutkan bahwa pariwisata menduduki posisi keempat sebagai penyumbang perolehan devisa negara terbesar pada tahun 2015, dimana posisi tersebut berada di bawah sumbangan minyak dan gas bumi (migas), batu bara, serta minyak kelapa sawit.⁴ Meningkatnya sumbangan pariwisata terhadap penerimaan devisa juga turut mempengaruhi peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional secara konsisten, yakni sebesar 4,25 persen pada tahun 2015 hingga menembus angka 4,8 persen pada tahun 2019. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sehingga, upaya pengembangan perlu dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar mampu menjadi instrumen yang dapat memberikan nilai dan manfaat secara lebih luas.⁵

Berkenaan dengan hal tersebut, banyak daerah di Indonesia yang dewasa ini berupaya mengembangkan sumber daya pariwisata dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimilikinya. Di antara berbagai daerah di Indonesia, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang memiliki prospek strategis di sektor pariwisata sebagai mesin penggerak perekonomian wilayah setempat. Seperti yang termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 yang secara garis besar mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan secara berkeadilan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan empat pilar prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang diantaranya adalah sebagai berikut.

⁴ Kemenparekraf/Baparekraf Republik Indonesia. *Statistik Devisa Pariwisata*. Diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/statistik-devisa-pariwisata>, pada 18 Oktober 2021.

⁵ Mahadevan. (2016). Regional Impacts Tourism-Led Growth Poverty and Income Inequality: A Dynamic General Equilibrium Analysis for Indonesia. *Journal of Tourism Economics*, 23(3), 1-17.

Tabel I.2 Empat Pilar Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

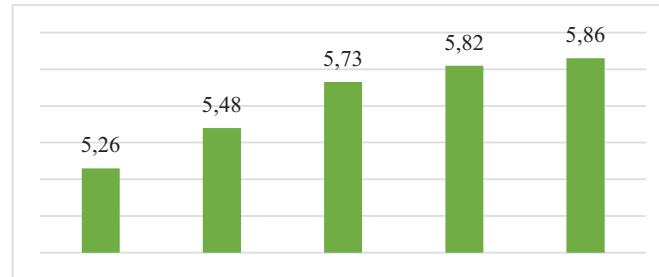
Pilar	Prioritas Pembangunan	Sasaran Spesifik
1	Penguatan daya saing industri manufaktur dan perdagangan	Biaya produksi manufaktur dapat diminimasi melalui efisiensi biaya logistik, sehingga produk manufaktur Jawa Timur dapat lebih bersaing secara domestik maupun internasional.
2	Peningkatan nilai tambah agroindustri	Jawa Timur memiliki beragam komoditas agrikultur dan hortikultur unggulan dengan dukungan salah satu sistem irigasi terbaik di Indonesia. Potensinya dapat ditingkatkan melalui hilirisasi agroindustri.
3	Percepatan pertumbuhan industri pariwisata	Industri pariwisata di Jawa Timur memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibanding industri-industri lain, yang dapat dijaga momentumnya melalui optimalisasi kawasan-kawasan strategis pariwisata.
4	Pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah	Industri mikro, kecil, dan menengah menjadi <i>buffer</i> dan <i>source of resilience</i> dalam kondisi perlambatan ekonomi, dengan berfokus pada pemenuhan pasar domestik.

Sumber: Hasil Analisis Kedeputan Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Berdasarkan tabel I.2 tersebut, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata menjadi pilar ketiga prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang cukup potensial untuk dikembangkan karena mampu membuahkan kinerja positif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja positif tersebut tercermin pada kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Yakni dari semula 5,26 persen pada tahun 2014, naik menjadi 5,48 persen pada tahun 2015. Kemudian menjadi 5,73 persen pada tahun 2016, angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 mencapai 5,82 persen serta tahun 2018 sebesar 5,86 persen (Gambar I.1). Pun demikian dengan jumlah kunjungan wisman yang menunjukkan peningkatan sebesar 21,26 persen, yakni dari semula 680.509 kunjungan pada tahun 2017 menjadi 837.358 kunjungan pada tahun 2018.⁶

⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Gambar I.1 Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018



Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Selain mampu menstimulasi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, peran sektor pariwisata juga dinilai cukup strategis karena keberadaannya yang mampu menjadi penunjang bagi sektor lain. Seperti halnya peningkatan kunjungan wisatawan akan berimpak pada peningkatan sektor konsumsi, akomodasi, dan/atau kebutuhan-kebutuhan jasa lainnya, dimana keadaan tersebut berujung pada perluasan penciptaan lapangan kerja itu sendiri. Tercatat hingga tahun 2019, total kondisi eksisting pariwisata di Provinsi Jawa Timur mencapai 627 daya tarik wisata, dengan rincian jumlah wisata alam sebanyak 243, wisata budaya sebanyak 186, serta wisata buatan sebanyak 198.⁷

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menggiatkan industri pariwisata juga tercermin dari upayanya yang memberikan kewenangan secara lebih besar kepada masyarakat di desa untuk dapat membangun wilayah desanya. Ini selaras dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa sebagai bagian dari upaya mengembangkan pembangunan dari pinggiran, maka pembangunan di desa mendapatkan perhatian penting dari pemerintah. Pembangunan tersebut dilakukan diantaranya dengan memanfaatkan potensi keunikan sumber daya yang ada di wilayah desa untuk kegiatan pariwisata, atau yang disebut sebagai desa wisata.

Hingga tahun 2019, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa setidaknya terdapat 292 desa wisata di wilayah Jawa Timur. Jumlah tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur

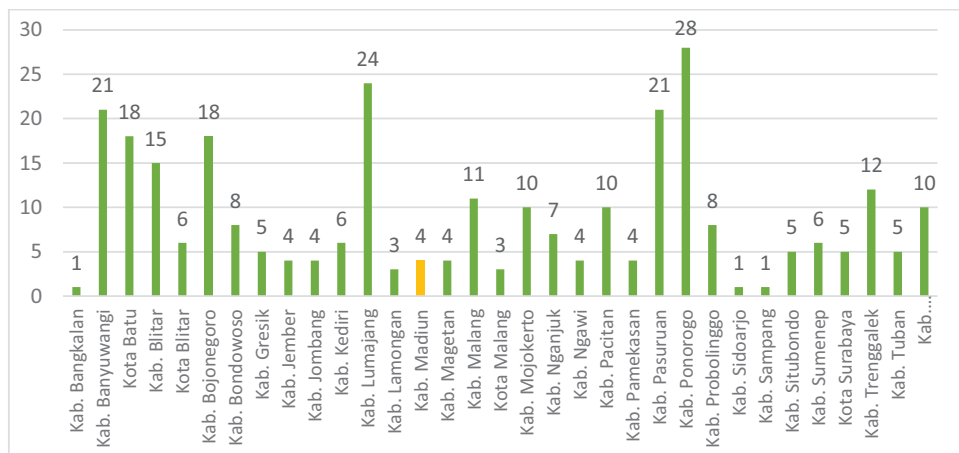
⁷ *Ibid.*

menempati urutan ketiga jumlah desa wisata terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat pada urutan pertama dan Provinsi Jawa Tengah pada urutan kedua. Keseluruhan desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur tersebut tersebar di beberapa kawasan strategis sebagai berikut.⁸

- Kawasan Selingkar Wilis. Kawasan ini mencakup 6 kabupaten, yakni Kabupaten Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri; serta Kabupaten Pacitan sebagai Kawasan Lintas Selatan;
- Kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Kawasan ini mencakup 7 kabupaten/kota, seperti diantaranya Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo;
- Kawasan Selingkar Ijen. Kawasan ini mencakup 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo;
- Kawasan Gerbangkertasusila, yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan; serta
- Kawasan Madura, meliputi seluruh wilayah di Pulau Madura.

Adapun persebaran jumlah desa wisata di setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dapat tercermin pada Gambar I.2 berikut.

Gambar I.2 Persebaran Jumlah Desa Wisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2019



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur (2019)

⁸ *Ibid.*

Di antara 292 desa wisata yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut, enam desa wisata diantaranya telah berhasil mendapatkan penghargaan dalam lingkup nasional pada ajang *Indonesia Sustainable Tourism Award* (ISTA). Berikut ini disajikan Tabel I.3 yang memaparkan data desa wisata terbaik di Provinsi Jawa Timur pada ajang ISTA.

Tabel I.3 Desa Wisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang Meraih Penghargaan *Indonesia Sustainable Tourism Award* (ISTA)

No.	Nama Desa Wisata	Penghargaan
1.	Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang	Pemenang ISTA 2018 Kategori Pemanfaatan Ekonomi
2.	Kampung Belajar Tanoker, Desa Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember	Pemenang ISTA 2018 Kategori Pelestarian Sosial-Budaya
3.	Desa Wisata “Boonpring” Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang	Pemenang ISTA 2019 Kategori Pemanfaatan Ekonomi
4.	Desa Wisata Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun	Pemenang ISTA 2019 Kategori Pelestarian Sosial-Budaya
5.	Wisata Grand Watu Dodol, Kabupaten Banyuwangi	Pemenang ISTA 2019 Kategori Tata Kelola Destinasi
6.	Desa Wisata Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan	Pemenang ISTA 2019 Kategori Pelestarian Lingkungan

Sumber: Kemenparekraf RI

Gambar I.2 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun menjadi daerah di Kawasan Selingkar Wilis dengan keberadaan desa wisata yang relatif masih minim jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Setidaknya hanya terdapat empat desa wisata yang terletak di Kabupaten Madiun, seperti diantaranya Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Desa Wisata Brumbun di Kecamatan Wungu, Desa Wisata Kare di Kecamatan Kare, serta Desa Wisata Pundensari di Kecamatan Madiun. Meskipun terbilang minim, keadaan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah setempat untuk terus mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya.

Hal tersebut terbukti pada Tabel I.3, dimana Kabupaten Madiun menjadi salah satu daerah diantara enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi pembicaraan dalam konteks pariwisata nasional karena keberadaan Desa

Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang berhasil meraih apresiasi dalam ajang ISTA 2019. Kemenparekraf menyebutkan bahwa ISTA dilakukan untuk mengukur sejauh mana implementasi pengembangan pariwisata dilakukan, terutama dalam hal pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan di Indonesia.

Dapat dilihat pada Tabel I.3 bahwa hanya terdapat enam desa wisata di Jawa Timur yang berhasil menyandang predikat ISTA, dimana ini mengindikasikan bahwa keenam desa wisata tersebut telah mencerminkan kapasitas tata kelola destinasi wisata yang tentunya lebih unggul dibandingkan dengan desa wisata yang lain. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa masing-masing dari desa wisata tersebut tentunya memiliki keunikan potensi dan sumber daya pariwisata yang khas, untuk kemudian menjadi suatu nilai tambah (*added value*) yang membedakan antara desa wisata yang satu dengan desa wisata yang lain.

Ini selaras dengan pernyataan Kemenparekraf/Baparekraf RI bahwa tidak setiap desa dapat dijadikan sebagai desa wisata karena untuk menjadi sebuah desa wisata haruslah memenuhi tiga prasyarat utama. Salah satunya adalah terkait kekhasan dan keunikan suatu wilayah yang menyebabkan dikembangkannya menjadi sebuah daerah tujuan wisata.⁹ Dalam kaitannya dengan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, beberapa hal permasalahan yang melatarbelakangi sekaligus hal-hal yang menjadi kekhasan dikembangkannya desa wisata di wilayah tersebut dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut.

Pertama, program pengembangan Desa Wisata Mendak diinisiasi sebagai instrumen untuk membangkitkan kembali kondisi perekonomian masyarakat Desa Mendak atas kejadian bencana hama (Bakteri Pembuluh Kayu Cengkih/BPKC) yang menyerang pada komoditas andalan masyarakat Desa Mendak, yakni tanaman cengkih. Secara konsep, bencana hama tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bencana alam, dimana hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik

⁹ Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2021). *Desa Wisata Terus Tumbuh Sebagai Pariwisata Alternatif*. Dilansir dari <https://www.kemenparekraf.go.id/kebijakan/Desa-Wisata-Terus-Tumbuh-Sebagai-Pariwisata-Alternatif+&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id>, pada 15 Januari 2022.

Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bencana alam hama tersebut terjadi secara perlahan, mulai dari tahun 2011 hingga pada puncaknya tahun 2016 telah menyerang dan memusnahkan sekitar 150 hektar kebun cengkih di Desa Mendak. Adanya bencana alam hama tersebut telah memperpuruk keadaan masyarakat desa setempat, dimana tanaman cengkih yang dianggap sebagai “pohon emas” tidak dapat lagi menjadi sandaran perekonomian.¹⁰

Sedangkan keberadaan cengkih yang menjadi komoditas andalan masyarakat Desa Mendak tersebut dapat terlihat dari komposisi penduduk Desa Mendak. Yakni dari total penduduk sejumlah 760 jiwa (242 Kartu Keluarga/KK), 75 persen penduduk diantaranya bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, 10 persen penduduk bermata pencaharian di sektor jasa, 9 persen penduduk merupakan karyawan swasta, serta 6 persen penduduk berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri. Selain itu, tercatat pula bahwa akumulasi total pendapatan petani cengkih di Desa Mendak pada mulanya dapat mencapai Rp 3 miliar dalam setiap kali panen. Sehingga tidak heran jika Desa Mendak menjadi salah satu desa penghasil cengkih terbesar di wilayah Kabupaten Madiun.¹¹

Kedua, program pengembangan Desa Wisata Mendak pada awalnya bukan menjadi tujuan yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Desa Mendak. Berdasarkan wawancara pendahuluan tanggal 21 September 2021, Ibu Nur Cholifah selaku Kepala Desa Mendak menyebutkan bahwa gambaran untuk mengembangkan desa wisata merupakan hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pengembangan desa wisata tersebut merupakan buah tuntutan dari masyarakat Desa Mendak agar dicarikan alternatif lapangan pekerjaan sebagai solusi atas permasalahan ekonomi yang tengah mereka hadapi. Atas dasar tersebut, Pemerintah Desa Mendak kemudian secara responsif mencanangkan program

¹⁰ Rahadian Bagus. (2017). *Pohon Emas di Desanya Punah, Kades Cantik ini Jatuh Hati ke Tapak Bima untuk Sejahteraan Warganya*. Diakses dari <https://jatim.tribunnews.com/2017/09/26/pohon-emas-di-desanya-punah-kades-cantik-ini-jatuh-hati-ke-tapak-bima-untuk-sejahteraan-warganya?page=2>, pada 22 Agustus 2021.

¹¹ Muhlis Al Alawi. (2019). *Cerita Petani Madiun, Sukses Bangun Wisata Watu Rumpuk Setelah Cengkih Musnah Diserang Virus*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/06/20/08310291/cerita-petani-madiun-sukses-bangun-wisata-watu-rumpuk-setelah-cengkih-musnah?page=all> pada 20 Agustus 2021.

pengembangan desa wisata sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan kondisi perekonomian secara berkelanjutan, menyadari keberadaannya yang secara potensial mampu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat setempat, seperti adanya insentif lokal, sumber pendapatan baru, dan juga manfaat sosial secara lebih luas lainnya.¹²

Ketiga, tidak sedikit dari masyarakat Desa Mendak pada mulanya menilai bahwa program pengembangan desa wisata bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan keberhasilannya karena letak Desa Mendak yang berada di daerah terpencil dan relatif jauh dari pusat perkotaan. Namun di sisi lain, Pemerintah Desa Mendak meyakini upaya pengembangan pariwisata akan menjadi daya ungkit tersendiri bagi kondisi perekonomian masyarakat karena Desa Mendak memiliki sejumlah potensi dan sumber daya pariwisata yang khas, untuk kemudian menjadi suatu nilai tambah (*added value*) yang dapat “dijual”.

Hal tersebut berkenaan dengan kondisi geografis Desa Wisata Mendak yang berada di wilayah pegunungan, tepatnya di lereng Gunung Wilis, sehingga memiliki potensi panorama alam yang sangat cocok untuk dibangun dan dikembangkan menjadi desa wisata berbasis alam. Beberapa paket wisata yang dikembangkan diantaranya adalah bekas lahan cengkeh yang kini dialihfungsikan menjadi sektor produktif wisata alam bertajuk Wana Wisata Watu Rumpuk, pendakian puncak Tapak Bimo dan intip Gua Jepang, wisata kuliner, hingga wisata edukasi pengolahan porang, kopi, dan coklat khas Mendak. Di antara beberapa paket wisata tersebut, Wana Wisata Watu Rumpuk menjadi salah satu usaha daya tarik wisata yang paling diminati oleh wisatawan karena banyaknya atraksi buatan, ornamen, serta titik-titik yang indah untuk berswafoto dengan latar belakang panorama alam Gunung Wilis.¹³

¹² Mahadevan. (2016). Regional Impacts Tourism-Led Growth Poverty and Income: Inequality: A Dynamic General Equilibrium Analysis for Indonesia. *Journal of Tourism Economics*, 23(3), 1-17.

¹³ Muhlis Al Alawi. (2019). *Cerita Petani Madiun, Sukses Bangun Wisata Watu Rumpuk Setelah Cengkih Musnah Diserang Virus*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/06/20/08310291/cerita-petani-madiun-sukses-bangun-wisata-watu-rumpuk-setelah-cengkih-musnah?page=all>, pada 20 Agustus 2021.

Upaya Pemerintah Desa Mendak dalam mengimplementasikan program pengembangan desa wisata ditetapkan melalui Peraturan Desa Mendak Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Desa Wisata dan secara resmi mulai dibuka pada tahun 2018. Program pengembangan Desa Wisata Mendak ini dilakukan melalui jalinan kemitraan antara Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds selaku pemilik lahan area Wana Wisata Watu Rumpuk, dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Panguripan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Mandiri yang kemudian dimanifestasikan dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) Pengelolaan dan Pengembangan Wana Wisata Watu Rumpuk Nomor 22/044.6/PKS.WST/LWU /DIVRE JATIM/2018.

Berangkat dari tekad tersebut, program pengembangan Desa Wisata Mendak yang disasar untuk membangkitkan kondisi perekonomian masyarakat Desa Mendak tampak menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari mayoritas masyarakat desa yang pada mulanya menghadapi keterbatasan mata pencaharian, kini menemukan alternatif mata pencaharian yang dapat menunjang perekonomian.¹⁴ Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang masyarakat Desa Mendak, yakni Ibu Etiyo selaku penjual di lapak UMKM Watu Rumpuk melalui penuturan sebagai berikut.

“Mulai tahun 2018 niku rame mbak. Sak durunge Corona iku aku satu hari iku dapat Rp 1.500.000. Lha kabeh payu lho mbak. Hari biasa yo tetep rame minimal Rp 500.000 – Rp 600.000 mbak, pokok e Rp 500.000 ke atas. Nek hari minggu utawa tanggal merah utawa bodo utawa tahun baru ngono malah ora karuan akehe. Satu hari nek enek acara ngono malah iso kenek 2.000.000. Sejak Covid sampe saiki yo rame lah nek minggu, nek terang. Tapi ancene sudo mbak. Wisata kuwi nggon uwong, dadi mesti ramene. Ngono wi yo payu kabeh lho mbak. Tegese kabeh kudu soko deso kene mbak, kudu masyarakat Mendak sing dodolan.”¹⁵

Pun demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Alifagusta bahwa program pengembangan pariwisata tersebut telah memberikan kontribusi bagi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dilakukan di Wisata Alam Watu Rumpuk Desa Wisata Mendak pada 5 Juni 2022 pukul 10.30 WIB.

masyarakat Desa Mendak yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dimana mereka dapat memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp 1.700.000,- setiap bulannya.¹⁶ Sementara berdasarkan observasi penulis, tercatat jumlah penginapan di sekitar lokasi Desa Wisata Mendak sebanyak 18 unit, dimana semuanya merupakan aset pribadi milik masyarakat Desa Mendak.

Kinerja positif dari adanya program pengembangan Desa Wisata Mendak juga dapat dilihat dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya turut berkontribusi pada tingginya penerimaan BUMDes dari sektor pariwisata seperti yang tercermin pada Tabel I.4 dan Tabel I.5 sebagai berikut.

Tabel I.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Desa Wisata Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Kunjungan
2018	66.139 wisatawan
2019	75.921 wisatawan
2020	17.300 wisatawan

Sumber: Diolah dari Arsip Data Desa Mendak

Tabel I.5 Data Pendapatan BUMDes Usaha Mandiri Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun Tahun 2018-2020

Sektor Pendapatan BUMDes	Jumlah Pendapatan		
	2018	2019	2020
Pariwisata	Rp 214.951.750	Rp 274.105.650	Rp 87.785.775
Pertokoan	-	Rp 1.277.250	Rp 1.771.000
Pengairan (HIPPAM)	-	Rp 8.185.000	Rp 2.070.000
Total	Rp 214.951.750	Rp 283.567.900	Rp 91.626.775

Sumber: Diolah dari Arsip Data Desa Mendak

Berdasarkan data dalam Tabel I.4, dapat diketahui bahwa aktivitas kunjungan wisatawan di Desa Wisata Mendak sejak dibuka pada tahun 2018 hingga tahun berikutnya terbilang cukup tinggi, meskipun pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah pengunjung karena mewabahnya pandemi Covid-19. Tentu hal

¹⁶ Alifagusta. (2020). Analisis Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Manajemen Pasca Bencana Melalui Pembangunan Pariwisata di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. *Tesis*, Universitas Sebelas Maret.

ini berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan yang diterima. Seperti tampak pada data dalam Tabel I.5 yang menunjukkan bahwa unit pariwisata menjadi sektor yang berkontribusi paling besar dalam menyumbang pendapatan BUMDes jika dibandingkan dengan sektor-sektor penyumbang lainnya.

Eksistensi pariwisata yang berkontribusi positif tersebut membuat pengembangan sektor pariwisata dianggap sebagai kendaraan pembangunan ekonomi dan dipromosikan sebagai sumber pendapatan dan pekerjaan yang efektif,¹⁷ khususnya di daerah pedesaan yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dalam kaitannya dengan keberadaan sumber daya alam dan budaya yang otentik.¹⁸ Atas dasar itu pula, pengembangan pariwisata dianggap sebagai salah satu strategi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi riil daerah setempat. Seperti halnya keberadaan pariwisata yang dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat di sekitar objek wisata sekaligus pemerintah di wilayah setempat. Sehingga, dampak pariwisata tidak jarang dikaitkan dengan keberadaannya yang dapat berkontribusi pada revitalisasi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup penduduk.¹⁹

Keberhasilan Pemerintah Desa Mendak dalam mencanangkan program pengembangan desa wisata semakin terlihat dari adanya respon positif yang datang dari berbagai entitas melalui bentuk penghargaan-penghargaan seperti yang tercermin dalam Tabel I.6 sebagai berikut.

¹⁷ Irianto, J. (2017). Policies and Tourism Branding. *Prosiding Semnasfi Universitas Muhammad Sidoarjo*, 1(1): 1-12.

¹⁸ Latkova & Vogt. (2012). Residents' Attitudes toward Existing and Future Tourism Development in Rural Communities. *Journal of Travel Research*, 51(1), 50-67.

¹⁹ Rero. (2011). *Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Spiritual di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur NTT*. Denpasar: Program Studi Kajian Pariwisata.

Tabel I.6 Prestasi Desa Mendak, Kecamatan Dagangan,
Kabupaten Madiun Tahun 2018-2019

No.	Prestasi	Keterangan
1.	Piagam Penghargaan Nomor 360/1383/208.2/2018: Desa Mendak Sebagai Juara I Lomba Desa Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	Desa Mendak menjadi salah satu desa terbaik di Jawa Timur dalam hal tata kelola bencana, menyadari kondisi geografis Desa Mendak yang berada di wilayah pegunungan (daerah rawan bencana) dan juga ketangguhan Desa Mendak dalam mengatasi bencana alam hama melalui program pengembangan desa wisata.
2.	Piagam Penghargaan Nomor 556.1/60505/118.5/2018: Wisata Watu Rumpuk, Desa Wisata Mendak, Sebagai Juara III Daya Tarik Wisata Alam Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	Desa Mendak menjadi salah satu desa wisata yang memiliki daya tarik wisata alam terbaik di Jawa Timur. Predikat tersebut bisa didapatkan karena adanya kapasitas tata kelola Pemerintah Desa Mendak yang baik dalam hal kepariwisataan di wilayahnya.
3.	Piagam Penghargaan Bupati Madiun: BUMDes “Usaha Mandiri” Desa Mendak Sebagai Juara I Lomba BUMDes Penggerak Destinasi Wisata Terbaik Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2018	Desa Mendak menjadi salah satu desa di Kabupaten Madiun yang memiliki unsur kapasitas tata kelola BUMDes yang baik dalam menggerakkan unit usahanya di bidang pariwisata.
4.	Piagam Penghargaan Nomor 412.2/8393/112.3/2019: Desa Mendak Sebagai Juara III Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Pedesaan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	Desa Mendak menjadi salah satu desa terbaik di Jawa Timur yang berhasil mengelola sekaligus mendokumentasikan usaha ekonomi di desanya, yakni terkait dengan usaha ekonomi di bidang kepariwisataan.
5.	Piagam Penghargaan Nomor 556.5/76306/118.6/2019: Wisata Watu Rumpuk, Desa Wisata Mendak, Sebagai Pemenang 10 Besar Anugerah Toilet Bersih di Kawasan Daya Tarik Wisata Jawa Timur Tahun 2019	Desa Mendak menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur yang memiliki kapasitas tata kelola yang baik dalam mengembangkan wisatanya, termasuk di dalamnya adalah terkait pengelolaan fasilitas wisata.
6.	Anugerah Program Desa Wisata Cerdas Mandiri Sejahtera (Dewi Cemara) oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	Desa Wisata Mendak menjadi salah satu desa di Jawa Timur yang terpilih menjadi agen pendorong sentra pertumbuhan ekonomi berbasis wisata di pedesaan. Hal ini selaras dengan maksud dikembangkannya Desa

		Wisata Mendak yang salah satunya adalah untuk membangkitkan kembali kondisi ekonomi masyarakat Desa Mendak pasca terjadinya bencana alam hama.
--	--	--

Sumber: Diolah dari Arsip Data Desa Mendak

Gambar I.3 Penghargaan Tingkat Provinsi Jawa Timur



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Tabel I.6 dan Gambar I.3 di atas merupakan bukti nyata bahwa program pengembangan Desa Wisata Mendak yang disasar sebagai daya ungkit pasca terjadinya bencana alam hama telah menunjukkan sebuah keberhasilan. Terkait dengan keberhasilan di sektor pariwisata, terdapat studi yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan sektor potensial pariwisata dapat dipengaruhi oleh adanya kapasitas suatu entitas untuk menerapkan strategi yang melibatkan adanya pengaturan sumber daya yang efektif, pelibatan unsur masyarakat, serta koordinasi dan kolaborasi antar aktor yang terlibat.²⁰ Unsur-unsur kapasitas sebagaimana yang telah diuraikan, pada dasarnya, terangkum dalam apa yang disebut sebagai kapasitas tata kelola (*governance capacity*).²¹ Atas dasar hal tersebut, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori *governance capacity* untuk mengetahui bagaimana kapasitas tata kelola pemangku kepentingan yang dibangun dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak, hingga program pengembangan Desa Wisata Mendak tersebut menemui suatu titik keberhasilan.

²⁰ Valente, F., Dredge, D., & Lohmann. (2015). Leadership and Governance in Regional Tourism. *Journal of Destination Marketing & Management*.

²¹ Tan. (2019). *Decentralization and Governance Capacity*. Switzerland: Palgrave Macmillan. Hal. 50-56.

Peneliti menggunakan teori *governance capacity* karena bersifat komprehensif dalam menguraikan kapasitas yang diperlukan suatu jaringan entitas dalam menjalankan suatu program/kebijakan yang mengakomodasi kepentingan publik.²² Seperti halnya, kapasitas jaringan pemangku kepentingan dalam melakukan pengaturan sumber daya yang akan digunakan dalam suatu program/kebijakan, kapasitas jaringan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan melalui efektivitas perencanaan dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan dalam sebuah jaringan, kapasitas jaringan pemangku kepentingan sebagai sumber daya pelaksana program/kebijakan, hingga kapasitas kelembagaan yang turut mempengaruhi kinerja tata kelola program/ kebijakan itu dilakukan.²³

Kerangka kapasitas dalam teori *governance capacity* tersebut sesuai dengan karakteristik nilai yang termuat dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak. Mulai dari kapasitas pengaturan sumber daya yang ditunjukkan oleh langkah Pemerintah Desa Mendak dalam mengelola sumber daya yang dikerahkan dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak. Kemudian kapasitas pengambilan keputusan ditunjukkan oleh langkah Pemerintah Desa Mendak dalam merespon permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pasca terjadinya bencana alam hama, langkah Pemerintah Desa Mendak dalam mengkoordinasikan beragam kepentingan, untuk kemudian menghadirkan program pengembangan desa wisata sebagai sebuah upaya pemecahan masalah yang merepresentasikan kepentingan kolektif. Adapun kapasitas sumber daya pelaksana dalam hal ini ditunjukkan oleh kapasitas SDM pariwisata dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak. Serta terakhir, kapasitas lokal yang ditunjukkan oleh kerangka hukum yang menentukan aturan main para pemangku kepentingan dan modal sosial yang menunjang program pengembangan Desa Wisata Mendak.

²² Fuentes. (2013). *Governance for The Tourism Sector and Its Measurement*. UNWTO.

²³ *Ibid.*

Terdapat enam penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan bagi penelitian ini. Masing-masing diantaranya dijelaskan dalam Tabel I.7 sebagai berikut.

Tabel I.7 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Perspektif Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>A Framework for Assesing Governance Capacity: An Illustration from Vietnam's Forestry Reforms</i> oleh Dang dkk. ²⁴	Penelitian ini mengembangkan kerangka <i>governance capacity</i> yang didasarkan pada pendekatan pengaturan kebijakan. Kerangka tersebut menyoroti dua unsur kapasitas penting dalam <i>governance capacity</i> . Yakni <i>institutional capacity</i> yang menentukan ‘aturan main’ (<i>policy arrangement</i>) para aktor, serta <i>governance performance</i> yang diukur dari kapasitas pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya.	Penelitian ini menyajikan kerangka perspektif untuk menganalisis <i>governance capacity</i> dan telah menggambarkan penerapan kerangka perspektif tersebut dengan menggunakan kasus kebijakan <i>forest land allocation</i> (FLA) Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>policy arrangement</i> , pengambilan keputusan, dan mobilisasi sumber daya merupakan elemen utama dari <i>governance capacity</i> . Dimana interaksi yang terjadi diantaranya membentuk dua unsur kapasitas penting, yakni <i>institutional capacity</i> dan <i>policy performance</i> . Adapun terkait dengan kebijakan <i>forest land allocation</i> (FLA) Vietnam, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam interaksi ketiga elemen <i>governance capacity</i> tersebut, yakni perbedaan pandangan tentang tujuan dan strategi dari para aktor yang terlibat, sehingga memerlukan pembelajaran sosial untuk mendefinisikan tujuan kolektif.
2.	<i>Balancing Governance Capacity and</i>	Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan kerangka <i>governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani krisis pandemi Covid-19, Pemerintah

²⁴ Dang, T.K.P., Hamakers, I.J.V., & Arts, B. (2016). A Framework for Assessing Governance Capacity: An Illustration from Vietnam’s Forestry Reforms. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 0(0), 1-12.

	<i>Legitimacy: How the Norwegian Government Handled the COVID-19 Crisis as a High Performer</i> oleh Christensen & Læg Reid. ²⁵	<i>capacity</i> , yang terdiri atas <i>analytical capacity</i> , <i>coordination capacity</i> , serta <i>delivering and regulatory capacity</i> .	Norwegia menggabungkan antara kapasitas tata kelola dan legitimasi pemerintahan sebagai dua aspek krusial dalam manajemen krisis. Kapasitas tata kelola sendiri dibangun dari adanya tiga elemen utama. Yakni <i>analytical capacity</i> , dimana hasil temuan menjumpai adanya <i>analytical capacity</i> yang masih lemah dalam hal kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Kemudian, <i>coordination capacity</i> dan <i>delivering & regulatory capacity</i> , dimana hasil temuan menunjukkan sudah terbangunnya dua elemen kapasitas tersebut secara baik.
3.	<i>Governance Capacity of Local Government in Empoweing Small and Medium Enterprises in Indonesia</i> oleh Triastuti. ²⁶	Penelitian ini dianalisis dengan mengelaborasi kerangka <i>governance capacity</i> dari beberapa ahli yang menghasilkan tiga elemen kapasitas, yaitu <i>institutional capacity</i> , <i>policy capacity</i> , dan <i>management capacity</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM masih kurang optimal. Hal ini tercermin dari sisi kapasitas kelembagaan yang mengindikasikan belum adanya standar pelayanan minimal (SPM) dalam pemberdayaan UMKM di masing-masing kota. Dari sisi kapasitas kebijakan, terlihat bahwa belum semua kota memiliki peraturan daerah tentang UMKM. Adapun dari kapasitas manajemen menunjukkan bahwa belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kepentingan <i>stakeholders</i> yang terlibat.

²⁵ Christensen, T., & Læg Reid, P. (2020). Balancing Governance Capacity and Legitimacy: How the Norwegian Government Handled the COVID-19 Crisis as a High Performer. *Public Administration Review*, 80(5), 774-779.

²⁶ Triastuti. (2021). Governance Capacity of Local Government in Empoweing Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji (Jisipol)*, 2(2), 402-431.

4.	<i>Public Governance Capacity in the Accountability of Village-Owned Enterprise Management in Indonesia</i> oleh Kurniasih dan Setyoko. ²⁷	Penelitian ini dianalisis dengan mengembangkan perspektif <i>public governance</i> menurut Wang & Yang (2010) dan Loffler dkk (2012), yakni <i>institutional capacity</i> , <i>organizational capacity</i> , dan <i>collective action capacity</i> .	Hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas tata kelola publik dalam akuntabilitas pengelolaan BUMDes terbukti rendah karena minimnya <i>collective action capacity</i> . Aktor yang paling dominan dalam hal ini adalah pemerintah desa, sedangkan aktor lainnya belum memiliki kapasitas yang memadai. Oleh karena itu, mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes harus diarahkan pada penguatan kapasitas tata kelola dengan membuka ruang keterlibatan pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan harus diberikan peran yang jelas agar mereka mengerti tanggung jawabnya.
5.	Kapasitas Tata Kelola Persampahan di Kota Bandung (Studi pada Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung) oleh Shiddiq. ²⁸	Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan <i>governance capacity framework</i> menurut EIP Water (2013) yang mencakup tiga dimensi, yakni <i>knowing (learning dan resources capacity)</i> ; <i>wanting (stakeholders engagement capacity)</i> ; serta <i>enabling (implementing capacity)</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola pengelolaan sampah di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya badan/lembaga pengawas pengelolaan sampah di lapangan serta belum adanya <i>masterplan</i> terkait pengelolaan sampah di Kota Bandung. Meskipun demikian, pemerintah setempat telah berupaya menghadirkan <i>role model</i> kawasan bebas sampah yang dinilai cukup efektif dalam menginspirasi daerah lain di sekitarnya.

²⁷ Kurniasih & Setyoko. (2019). Public Governance Capacity in The Accountability of Village-Owned Enterprise Management in Indonesia. *Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage*, 5(2), 67-79.

²⁸ Shiddiq. (2019). Kapasitas Tata Kelola Persampahan di Kota Bandung (Studi pada Kelurahan Sukaluyu). *Skripsi*, Universitas Padjajaran.

6.	Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim oleh Mukhlis. ²⁹	Penelitian ini dianalisis dengan mengelaborasi kerangka <i>governance capacity</i> menurut Sedarmayanti (2003) dan Gupta dkk (2010) yang menghasilkan tiga dimensi kapasitas, yaitu <i>political governance</i> , <i>administrative governance</i> , dan secara khusus <i>resilience capacity</i> itu sendiri.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya adaptasi perubahan iklim telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebijakan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan (<i>political governance</i>), serta adanya implementasi pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam sistem pemerintahan kota setempat (<i>administrative governance</i>). Adapun kapasitas resiliensi dalam hal ini ditunjukkan oleh adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kebijakan/program, adanya kapasitas kepemimpinan yang memfasilitasi munculnya inovasi aksi adaptasi, adanya kapasitas komunikasi yang mendorong wadah koordinasi, serta adanya kapasitas kelembagaan yang baik.
----	--	--	---

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan uraian dalam Tabel I.7, penelitian ini memiliki perbedaan dengan keenam penelitian terdahulu. Penelitian pertama ditulis oleh Dang dkk dengan judul *A Framework for Assessing Governance Capacity: An Illustration from Vietnam's Forestry Reforms*. Penelitian tersebut mengkaji tentang kapasitas tata kelola dalam penerapan kebijakan *forest land allocation* (FLA) di Vietnam, dengan menyajikan *institutional capacity* yang menentukan *policy arrangement* para aktor dalam berinteraksi, serta *governance performance* yang diukur dari adanya *decision-making capacity* dan *mobilization capacity*. Sedangkan penelitian ini

²⁹ Mukhlis. (2016). Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(2), 1-16.

menggambarkan kapasitas tata kelola dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* menurut pemikiran Tan, yang terdiri atas *mobilization capacity*, *decision-making capacity*, *implementation capacity*, serta *institutional capacity*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama oleh Dang dkk terletak pada fokus dan lokus penelitian yang diusung. Sementara terkait kerangka perspektif, penelitian ini pada dasarnya selaras dengan pemikiran Dang dkk yang juga berupaya menjadikan kapasitas mobilisasi, kapasitas pengambilan keputusan, dan kapasitas institusional sebagai tiga dimensi utama pengukuran *governance capacity*. Akan tetapi, Dang dkk tidak menyertakan kapasitas implementasi di dalamnya. Sehingga, dapat dipahami bahwa penelitian ini berupaya mengisi kekosongan penelitian terdahulu yang juga menjadikannya lebih komprehensif dalam menganalisis kapasitas tata kelola.

Penelitian kedua ditulis oleh Christensen & Lægreid dengan judul *Balancing Governance Capacity and Legitimacy: How the Norwegian Government Handled the COVID-19 Crisis as a High Performer*. Penelitian tersebut mengkaji kapasitas tata kelola dan legitimasi pemerintahan dalam menangani krisis pandemi di Norwegia, dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* yang terdiri atas *analytical capacity (preparedness of the authorities)*, *coordination capacity (decision-making and collaboration)*, serta *delivering & regulatory capacity*. Sedangkan penelitian ini menggambarkan kapasitas tata kelola dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* menurut pemikiran Tan, yang terdiri atas *mobilization capacity*, *decision-making capacity*, *implementation capacity*, serta *institutional capacity*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kedua oleh Christensen & Lægreid terletak pada fokus dan lokus penelitian yang diusung. Adapun terkait kerangka perspektif, diketahui bahwa penelitian Christensen & Lægreid secara khusus menggunakan *analytical capacity* sebagai bagian dari kapasitas yang harus dihadirkan saat manajemen krisis, dimana kapasitas tersebut selaras dengan *mobilization capacity* sebagai dimensi pertama yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara dua kapasitas lainnya, yakni

coordination capacity selaras dengan *decision-making capacity* yang termuat dalam penelitian ini, serta *delivering & regulatory capacity* juga selaras dengan *institutional capacity* sebagai salah satu dimensi analisis dalam penelitian ini. Celah penelitian terdapat pada *implementation capacity*, dimana penelitian Christensen & Lægreid menggunakan *implementation capacity* sebagai kapasitas yang tergabung dalam *delivering & regulatory capacity*. Sementara penelitian ini menggunakan *implementation capacity* sebagai dimensi kapasitas yang berdiri sendiri.

Penelitian ketiga ditulis oleh Triastuti dengan judul *Governance Capacity of Local Government in Empoweing Small and Medium Enterprises in Indonesia*. Penelitian tersebut mengkaji kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di empat kota yang berbeda, yakni Bandung, Cimahi, Surakarta, dan Yogyakarta, dengan mengelaborasi perspektif *governance capacity* dari beberapa ahli untuk kemudian menghasilkan tiga elemen kapasitas, yaitu *institutional capacity*, *policy capacity*, dan *management capacity*. Sedangkan penelitian ini menggambarkan kapasitas tata kelola dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* menurut pemikiran Tan, yang terdiri atas *mobilization capacity*, *decision-making capacity*, *implementation capacity*, serta *institutional capacity*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga oleh Triastuti terletak pada fokus dan lokus penelitian yang diusung. Terkait dengan kerangka perspektif, penelitian oleh Tristuti lebih menitikberatkan fokus pada implementasi regulasi dan kebijakan, sementara penelitian ini menjabarkan tata kelola ke dalam empat dimensi yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lainnya.

Penelitian keempat ditulis oleh Kurniasih dan Setyoko dengan judul *Public Governance Capacity in the Accountability of Village-Owned Enterprise Management in Indonesia*. Penelitian tersebut menggambarkan kapasitas tata kelola pemangku kepentingan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dengan mengembangkan perspektif *public governance* menurut Wang & Yang dan Loffler dkk, yakni *institutional capacity*, *organizational capacity*, dan *collective action capacity*.

Sedangkan penelitian ini menggambarkan kapasitas tata kelola pemangku kepentingan dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* menurut pemikiran Tan, yang terdiri atas *mobilization capacity*, *decision-making capacity*, *implementation capacity*, serta *institutional capacity*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian keempat oleh Kurniasih dan Setyoko terletak pada fokus dan lokus penelitian yang diusung, meskipun dalam hal ini sama-sama mengkaji entitas pada level akar-rumput. Terkait dengan kerangka perspektif, penelitian oleh Kurniasih dan Setyoko menggunakan tiga dimensi kapasitas. Yakni *institutional capacity*, dimana kapasitas tersebut juga termuat dalam penelitian ini. Kemudian, *organizational capacity* dimana kapasitas tersebut menggabungkan dimensi *mobilization capacity* dan *implementation capacity* yang ada dalam penelitian ini. Serta terakhir, *collective action* dimana kapasitas tersebut juga selaras dengan dimensi *decision-making capacity* yang dalam penelitian ini. Meskipun kerangka perspektif yang diusung pada dasarnya memiliki keselarasan, namun kerangka perspektif *governance capacity* dalam penelitian oleh Kurniasih dan Setyoko tidak mengusung adanya kapasitas perencanaan. Sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah kekosongan tersebut dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* secara lebih komprehensif.

Penelitian kelima ditulis oleh Shiddiq dengan judul Kapasitas Tata Kelola Persampahan di Kota Bandung (Studi pada Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung). Penelitian tersebut mengkaji *local governance capacity* dalam menangani masalah persampahan di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung dengan menggunakan kerangka *governance capacity* menurut EIP Water yang mencakup tiga dimensi, yakni *knowing (learning dan resources capacity)*; *wanting (stakeholders engagement capacity)*; serta *enabling (implementing capacity)*. Sedangkan penelitian ini menggambarkan kapasitas tata kelola dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* menurut pemikiran Tan, yang terdiri atas *mobilization capacity*, *decision-making capacity*, *implementation*

capacity, serta *institutional capacity*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kelima oleh Shiddiq terletak pada fokus dan lokus penelitian yang diusung, meskipun dalam hal ini sama-sama mengkaji entitas pada level akar-rumput. Terkait dengan kerangka perspektif, penelitian oleh Shiddiq memiliki keselarasan dimensi kapasitas dengan penelitian ini. Yakni dimensi *knowing* yang di dalamnya memuat *learning and resources capacity* selaras dengan *mobilization capacity*. Kemudian dimensi *wanting* yang memuat *stakeholders engagement capacity* selaras dengan *decision-making capacity*. Serta dimensi *enabling* yang memuat *implementing capacity* selaras dengan *implementation capacity*. Meskipun kerangka perspektif yang diusung pada dasarnya memiliki keselarasan, namun kerangka *governance capacity* dalam penelitian oleh Shiddiq tidak mengusung adanya *institutional capacity*. Sehingga penelitian ini dapat mengisi celah kekosongan kerangka *governance capacity* yang tidak disebutkan dalam penelitian oleh Shiddiq tersebut.

Penelitian keenam ditulis oleh Mukhlis dengan judul Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim. Penelitian tersebut menggambarkan *local governance capacity* dalam konteks adaptasi perubahan iklim di Kota Bandar Lampung, dengan mengelaborasi kerangka *governance capacity* menurut Sedarmayanti dan Gupta dkk yang menghasilkan tiga dimensi kapasitas, yaitu *political governance*, *administrative governance*, dan secara khusus *resilience capacity* terkait isu perubahan iklim itu sendiri. Sedangkan penelitian ini menggambarkan kapasitas tata kelola dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan menggunakan kerangka perspektif *governance capacity* menurut pemikiran Tan, yang terdiri atas *mobilization capacity*, *decision-making capacity*, *implementation capacity*, serta *institutional capacity*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian keenam oleh Mukhlis terletak pada fokus dan lokus penelitian yang diusung. Terkait dengan kerangka perspektif, dimensi *political governance* yang diusung dalam penelitian oleh Mukhlis menggambarkan rencana pembangunan kebijakan adaptasi perubahan iklim, dimana hal tersebut selaras dengan substansi dimensi *decision-*

making yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian, dimensi *administrative governance* yang diusung dalam penelitian oleh Mukhlis menggambarkan pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam sistem pemerintahan kota setempat, dimana hal tersebut selaras dengan substansi dimensi *institutional capacity* yang terdapat dalam penelitian ini. Terakhir, yakni dimensi *resilience capacity* terkait isu perubahan iklim menggambarkan peran keterlibatan pemangku kepentingan beserta kapasitas kepemimpinan dalam kebijakan yang dicanangkan, dimana hal tersebut selaras dengan substansi dimensi *implementation capacity* yang terdapat dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, kerangka perspektif yang diusung dalam penelitian terdahulu oleh Mukhlis pada dasarnya memiliki keselarasan dengan penelitian ini, namun penelitian terdahulu tersebut tidak mengusung adanya *mobilization capacity*. Sehingga penelitian ini bermaksud mengisi celah kekosongan perspektif yang tidak disebutkan pada penelitian terdahulu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kerangka kapasitas tata kelola masih cukup terfragmentasi mengingat perspektif yang ditawarkan oleh masing-masing ahli memiliki dimensi yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman tentang kapasitas tata kelola secara lebih komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori *governance capacity* menurut pemikiran Tan yang di dalamnya memuat aspek-aspek pengukuran kapasitas tata kelola secara lebih komprehensif dan sesuai dengan konteks penelitian yang akan diteliti. Yakni terkait kapasitas tata kelola Pemerintah Desa Mendak untuk menyelaraskan tindakan bersama dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi program pengembangan desa wisata, dimana tindakan ini dilakukan untuk memastikan tercapainya pemulihan ekonomi masyarakat desa pasca terjadinya bencana hama.

Dimensi pengukuran kapasitas tata kelola menurut pemikiran Tan dinilai cukup komprehensif sebab mampu mengelaborasi pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya. Seperti halnya, *mobilization capacity* yang berkaitan dengan kapasitas pengaturan sumber daya; *decision-making capacity* yang berkaitan dengan kapasitas perencanaan, kebijakan, dan juga memfasilitasi kapasitas aktor untuk berkoordinasi; *implementation capacity* yang berkaitan dengan kapasitas

manajerial dan sumber daya pelaksana; serta *local capacity* yang berkaitan dengan kapasitas institusional. Sehingga, keberadaannya dapat mengisi kekosongan dan beberapa aspek terkait *governance capacity* yang belum dijelaskan dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan empiris dan permasalahan teoritis seperti yang telah diuraikan, maka urgensi penelitian ini yakni belum adanya rujukan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang program pengembangan desa wisata dilihat dari perspektif kapasitas tata kelola pemerintah level akar-rumput. Selaras dengan hal tersebut, memang terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai kapasitas tata kelola, namun fokus permasalahan dan lokus penelitian yang diusung berbeda dengan penelitian ini. Bahkan perspektif yang ditawarkan pun masih terfragmentasi antara satu sama lain. Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai keberhasilan program pengembangan Desa Mendak Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ditinjau dari perspektif *governance capacity*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana gambaran program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ditinjau dari perspektif *governance capacity*?”

I.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif *governance capacity*.

I.4 Manfaat

I.4.1 Manfaat Akademis

Berdasarkan analisis pada penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang mengkaji program pengembangan desa wisata berdasarkan perspektif *governance capacity*. Pun demikian halnya dengan

kerangka *governance capacity* yang masih terfragmentasi antara satu sama lainnya. Maka dari itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik sekaligus menjadi bahan rujukan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Utamanya dalam mengisi celah kekosongan terkait kerangka kapasitas tata kelola atau *governance capacity*.

Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini juga dapat menggambarkan kapasitas para pemangku kepentingan yang terlibat, baik itu dalam lingkup internal maupun eksternal, secara lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan realitas fenomena yang terjadi. Sehingga tidak hanya mengukur sejauh mana kapasitas yang ada, melainkan juga bagaimana dan mengapa hal itu terjadi melalui pemahaman dan pendeskripsian gambaran fenomena penelitian secara jelas di lapangan. Atas dasar tersebut, hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat dengan memberikan kajian terkait program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif *governance capacity*.

I.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau rekomendasi kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun agar lebih mampu mengoptimalkan peran dan kapasitas tata kelolanya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi *lesson learnt* bagi pemerintah daerah lain agar memiliki kapasitas tata kelola yang mampu menunjang keberhasilan program pengembangan pariwisata di level desa/kelurahan.

I.5 Landasan Teori

I.5.1 Governance

Governance merupakan bentuk pembaharuan dari *government*.³⁰ Dalam pandangan masyarakat luas, konsep *governance* dan *government* kerap kali mengalami kerancuan. Padahal, sejatinya kedua konsep tersebut memiliki makna yang berbeda. *Governance* menggambarkan tata kelola, pola hubungan, dan pengaturan proses pemerintahan dalam lingkup luas. Sementara *government* merujuk pada suatu entitas yang mengemban fungsi administrasi publik. Kebutuhan akan konsep *governance* ini muncul dari adanya keragaman kepentingan dan konflik yang melekat dalam masyarakat yang jika dibiarkan akan merugikan kepentingan masing-masing dan juga kepentingan bersama.³¹

Untuk itu, paradigma *governance* adalah tentang pentingnya interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah yang diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif, dimana interaksi tersebut didorong oleh dinamika ketergantungan antara para aktor.³² Ini mengindikasikan bahwa tidak ada aktor tunggal yang memiliki pengetahuan, sumber daya, dan kapasitas untuk memerintah sendiri dalam sistem masyarakat yang kompleks dan terfragmentasi. Sebaliknya, interaksi diperlukan untuk menegosiasikan tujuan bersama, untuk saling menukar/menyatukan ide, sumber daya, serta kompetensi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.³³

Masih dalam konteks yang sama, Nag memberikan definisi bahwa *governance* mengacu pada pengembangan gaya pemerintahan dimana batas-batas antara dan di dalam sektor publik dan sektor privat menjadi semu.³⁴ Peran pemerintah yang sebelumnya tidak dapat disangkal, kini semakin dilihat sebagai

³⁰ Ayu, S.K.A. (2021). Analisis Collaborative Governance Regime dalam Kebijakan Tata Ruang dan Wilayah di Kawasan Malang Raya. *Skripsi*, Universitas Airlangga.

³¹ Nag, N.S. (2018). Government, Governance, and Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 64(1), 122-130.

³² Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice*. Palgrave Macmillan. Hal. 16.

³³ Ansell, C., & Torfing, J. (2017). *Handbook on Theories of Governance*. Edward Elgar Publishing. Hal. 4.

³⁴ Nag. *Op. Cit.*, Hal. 125.

masalah sosial yang lebih umum, yang dapat diselesaikan oleh aktor-aktor lain, tidak hanya oleh institusi politik. Definisi selanjutnya berasal dari *Commission on Global Governance* yang merepresentasikan *governance* sebagai kompilasi dari beragam cara individu dan lembaga, publik dan swasta, dalam mengelola kepentingan bersama.³⁵ Ini adalah proses berkelanjutan dimana keberadaannya dapat mengakomodasi kepentingan yang bertentangan/beragam, untuk kemudian dapat memfasilitasi tercapainya tindakan kooperatif.

Setidaknya terdapat empat aspek yang termuat dalam definisi tersebut. Pertama, tata kelola bukanlah seperangkat aturan atau aktivitas, tetapi sebuah proses. Kedua, proses *governance* tidak didasarkan pada kontrol, tetapi pada koordinasi. Ketiga, *governance* melibatkan sektor publik dan sektor swasta. Keempat, *governance* bukan merupakan lembaga formal, tetapi interaksi yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan *governance* adalah untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan aktivitas warga melalui kekuatan sistem dan jaringan yang beragam untuk memaksimalkan kepentingan publik.³⁶ Hal ini diperkuat oleh pendapat Rose-ackerman yang menyatakan bahwa tujuan normatif dari *governance* adalah untuk mencapai efektivitas kebijakan publik dan keabsahan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.³⁷

I.5.2 Governance Capacity

I.5.2.1 Konsep Kapasitas

Kapasitas dalam konteks *governance capacity* dapat dipahami secara luas. Seperti diantaranya, Ingraham dan Kneeder yang mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan pemerintah untuk mengatur, mengembangkan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya keuangan, manusia, fisik, dan informasinya. Ada juga Eisinger yang menyatakan kapasitas sebagai seperangkat atribut yang membantu atau memungkinkan organisasi untuk mencapai misinya. Pendapat tersebut selaras

³⁵ Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1-8.

³⁶ Keping. *Op. Cit.*, Hal. 3.

³⁷ Rose-ackerman, S. (2016). What Does “Governance” Mean?. *An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 30(1), 23-27.

dengan apa yang dikemukakan oleh Goodman dkk bahwa kapasitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tujuan yang diinginkan.³⁸

Setidaknya terdapat lima aspek yang dapat digunakan untuk memaknai kapasitas dalam tata kelola publik.³⁹ Pertama, kapasitas terdiri dari tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan. Kedua, kapasitas mengandung unsur yang berwujud dan tidak berwujud. Ketiga, kapasitas biasanya ada dalam keadaan laten. Namun, dengan adanya perubahan kondisi eksternal dan/atau intervensi eksternal, kapasitas dapat mengungkapkan hasil yang lebih baik atau lebih baik. Keempat, meskipun bersifat laten, kapasitas bukanlah konsep yang statis. Ini berarti bahwa kapasitas dapat bertambah ataupun berkurang seiring dengan berjalannya waktu sebagai akibat dari dorongan faktor eksternal maupun internal. Kelima, kapasitas merupakan konsep yang multidimensi. Aspek-aspek inilah yang pada akhirnya menjadi penting untuk memahami konsep kapasitas secara komprehensif.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan konsep kapasitas seringkali dipertukarkan dengan sinonimnya yang mirip, seperti kompetensi dan kapabilitas. Seperti yang diketahui bahwa kompetensi mengacu pada atribusi individu, sedangkan kapabilitas mengacu pada kemampuan kolektif individu/kelompok, baik yang bersifat 'harder' maupun 'softer'. Seperti pengetahuan, keterampilan, sikap individu/kelompok, serta kompetensi mereka untuk melaksanakan suatu tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Adapun kapasitas mengacu pada kemampuan fungsi sistem. Ini berarti bahwa kapasitas tidak hanya bergantung pada kemampuan individu/kelompok, tetapi juga bergantung pada ukuran keseluruhan tugas, sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, dan juga kerangka kerja.⁴⁰

I.5.2.2 Governance Capacity

Governance capacity sebagai sebuah perspektif tentang upaya pengarahan dalam masyarakat telah dikemukakan oleh Popering-Verkerk dkk dalam tulisannya yang berjudul *A Framework for Governance Capacity: A Broad*

³⁸ Tan. *Loc. Cit.*, Hal. 52.

³⁹ *Ibid.*, Hal. 52-53.

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 54.

Perspective on Steering Efforts in Society. Dalam tulisannya tersebut, Popering-Verkerk dkk menyatakan bahwa pengetahuan tentang kapasitas untuk menangani isu-isu sosial yang tersebar di antara para aktor yang berinteraksi dalam jaringan pemerintahan, atau yang disebut sebagai perspektif *governance capacity*, memiliki konstruksi kerangka perspektif yang cukup beragam.⁴¹

Mulai dari pendapat Ricciardelli dalam buku yang berjudul “*Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*”. Ricciardelli menyatakan bahwa *governance capacity* memanfaatkan aspek-aspek terkait jaringan, keterlibatan, dan dukungan. Secara jelas, ini merujuk pada kemampuan untuk mengatur atau mengintervensi proses sosial guna mewujudkan tujuan kolektif, bersamaan dengan upaya untuk memastikan tindakan kolaboratif antar aktor pada tingkat administrasi dan domain kebijakan yang berbeda. Ini dilakukan untuk menjamin tercapainya akuntabilitas serta membangun sarana pemantauan kinerja dan kerangka kerja yang disepakati oleh seluruh aktor yang terlibat.⁴²

Selanjutnya, pendapat selaras dikemukakan oleh Dang dkk yang mencoba mendefinisikan *governance capacity* sebagai kemampuan seluruh aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah bersama. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing aktor, melainkan juga *institutional capacity* yang menentukan ‘aturan main’ (*policy arrangement*) aktor-aktor tersebut dalam berinteraksi. Oleh karena itu, dalam upaya pemecahan masalah bersama, penting bagi adanya kapasitas institusional yang memadai untuk mendukung proses kolektif tersebut. Selain *institutional capacity* yang memadai, kinerja tata kelola pemerintahan (*governance performance*) juga penting dalam meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah, yang dikonseptualisasikan sebagai kemampuan pemecahan masalah dari seluruh aktor yang terlibat yang diukur dalam dimensi

⁴¹ Popering-Verkerk, dkk. (2022). A Framework for Governance Capacity: A Broad Perspective on Steering Efforts in Society. *Administration & Society*, 1-28.

⁴² Farazmand, A. (2018). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer International Publishing. Hal. 2927.

proses dan dimensi dampak. Seperti diantaranya kemampuan untuk membuat keputusan bersama (*decision-making capacity*) dan memobilisasi sumber daya (*mobilization capacity*).⁴³

Lain halnya dengan Dang dkk, perspektif *governance capacity* yang secara khusus dimaksudkan untuk tata kelola lingkungan dikemukakan oleh Koop dkk, dimana *governance capacity* dalam hal ini dibangun atas dasar tiga dimensi utama.⁴⁴ Yakni *knowing*, mengacu pada kebutuhan untuk sepenuhnya menyadari, memahami, dan mempelajari permasalahan yang terjadi; *wanting*, mengacu pada komitmen para aktor untuk bekerja sama dalam menemukan solusi alternatif; serta *enabling* yang memungkinkan para aktor mengimplementasikan tindakan mereka atas adanya jaringan, sumber daya, dan instrumen tertentu.

Pun demikian dengan Christensen dkk yang berupaya membangun *governance capacity* sebagai sumber legitimasi yang secara khusus ditujukan untuk manajemen krisis. Ini menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola dengan fokus utama pada kapasitas koordinasi sumber daya publik. Kemudian melihat kapasitas analitis untuk penilaian risiko dan kerentanan, kapasitas regulasi sebagai sarana kontrol dan pengawasan, serta kapasitas pemberian layanan dalam kaitannya dengan penanganan krisis atau yang disebut sebagai kapasitas intervensi.⁴⁵ Baik Dang dkk, Koop dkk, maupun Christensen dkk, ketiga perspektif tersebut tampak relevan untuk menganalisis kapasitas tata kelola. Namun, kerangka perspektif yang dibangun tersebut tidak sepenuhnya mencakup konsep dan ruang lingkup tata kelola yang lebih luas.

Oleh karena itu, untuk membingkai pemahaman tentang *governance capacity* secara lebih komprehensif, penulis mengutip pendapat Tan yang menggambarkan *governance capacity* sebagai kemampuan pemerintah dalam

⁴³ Dang, T.K.P., Hamakers, I.J.V., & Arts, B. (2016). A Framework for Assessing Governance Capacity: An Illustration from Vietnam's Forestry Reforms. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 0(0), 1-12.

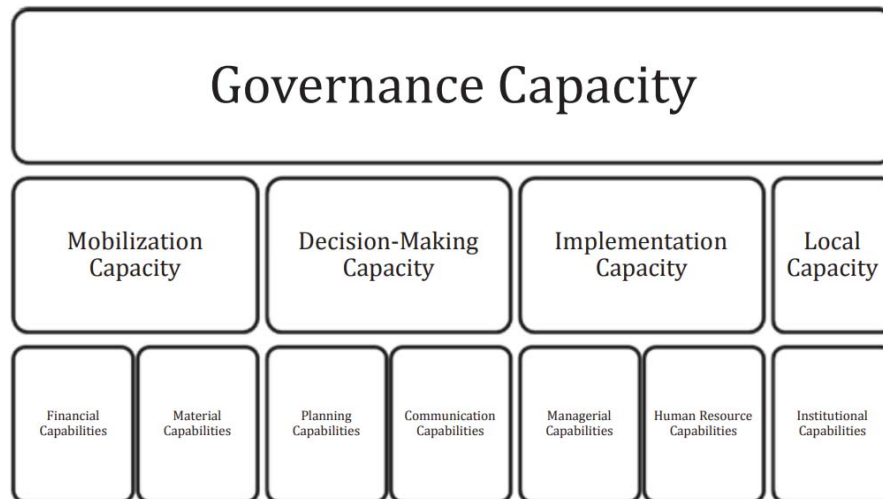
⁴⁴ Koop, dkk. (2017). Assessing the Governance Capacity of Cities to Address Challenges Water, Waste, and Climate Change. *Water Resour Manage*, 31, 3427-3443.

⁴⁵ Christensen, dkk. (2019). Organizing for Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy. In: Lægveid P., Rykkja L. (eds) Societal Security and Crisis Management. *New Security Challenges*. Palgrave Macmillan. Hal. 1-23.

memobilisasi sumber daya, mengambil keputusan, serta melaksanakan suatu tindakan kolektif bersama dengan aktor-aktor yang terlibat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini, keberhasilan tindakan pemerintah tidak hanya bergantung pada kinerja organisasi, melainkan juga pada sudut pandang aktor publik dan non-publik lainnya yang memiliki peran berbeda untuk ditegakkan dalam perspektif tata kelola. Ini mengindikasikan bahwa pandangan teoritis terhadap tata kelola publik tidak mengesampingkan peran aktor lain dengan mengurangi keterlibatannya menjadi pengamat pasif, melainkan juga memperhitungkan posisi relasional mereka dalam mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.⁴⁶

Untuk itu, komponen *governance capacity* menurut pemikiran Tan diturunkan dari landasan teoritis *governance capacity* yang mendasarinya, dimana keberadaannya merupakan gabungan dari kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas kondisi sekitarnya. Seperti diantaranya yaitu kapasitas mobilisasi, kapasitas pengambilan keputusan, kapasitas implementasi, dan kapasitas institusional. Komponen tersebut pada dasarnya selaras dengan pemikiran Dang dkk yang juga berupaya menjadikan kapasitas mobilisasi, kapasitas pengambilan keputusan, dan kapasitas institusional sebagai tiga dimensi utama pengukuran *governance capacity*. Akan tetapi, Dang dkk tidak menyertakan kapasitas implementasi di dalamnya. Sehingga, dapat dipahami bahwa persepektif *governance capacity* menurut Tan ini berupaya mengisi kekosongan literatur terdahulu yang juga menjadikannya lebih komprehensif dalam menganalisis kapasitas tata kelola. Selengkapnya dapat tercermin pada tercermin pada Gambar I.4 sebagai berikut.

⁴⁶ Tan. *Loc. Cit.*, Hal. 66-67.

Gambar I.4 Model Analitis *Local Governance Capacity*Sumber: Tan⁴⁷

I.5.2.2.1 *Mobilization Capacity*

Perspektif *governance capacity* memulai tanggung jawab pemerintah untuk dapat memobilisasi sumber daya yang diperlukan dari para aktor di domain lokal dan menyalurkannya secara bijaksana untuk kebutuhan dan tuntutan warga. Ini berarti bukan hanya tentang kemampuan untuk memiliki sumber daya, melainkan juga kemampuan untuk mengelola sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk membentuk mekanisme tata kelola. Mobilisasi sumber daya sebagai elemen pertama dari *governance capacity* didasarkan pada alasan bahwa dalam suatu aktivitas pemecahan masalah, para aktor membutuhkan sumber daya untuk melaksanakan tindakan tersebut. Pun demikian dengan tindakan kerja sama yang seringkali didorong oleh adanya kendala sumber daya. Sehingga, setiap organisasi harus bertukar atau bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh satu sama lainnya guna mencapai tujuan bersama.⁴⁸

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa sumber daya yang berperan penting dalam mekanisme tata kelola, yakni sumber daya modal yang

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 68.

⁴⁸ Dang dkk. *Op. Cit.*, Hal. 7.

mencakup kapabilitas finansial dan material, serta sumber daya organisasional yang mencakup informasi, struktur, dan jaringan sosial organisasi tersebut dibangun. Akan tetapi, pengukuran tentang sejauh mana kapasitas pemerintah dalam memobilisasi sumber daya tidak sebatas ditentukan oleh kedua sumber daya tersebut. Terdapat sumber daya penting lainnya yang turut menjadi determinan, seperti halnya sumber daya manusia yang memuat kapabilitas individu sebagai penggerak suatu organisasi, yang akan dijelaskan secara lebih lanjut pada komponen pengukuran *implementation capacity*.

1.5.2.2 Decision-Making Capacity

Perspektif *governance capacity* menempatkan kapasitas pengambilan keputusan sebagai suatu proses pemikiran para pemangku kepentingan dalam upaya pemecahan masalah untuk mendapatkan hasil yang akan diimplementasikan. Ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah bersama para aktor untuk dapat memilih alternatif yang terbaik dari berbagai opsi yang ada untuk menyelesaikan masalah serta sebagai bentuk komunikasi yang diharapkan dapat memenuhi ekspektasi publik. Dengan adanya pengambilan keputusan bersama, dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan lebih responsif terhadap para pemangku kepentingan yang terkena dampak kebijakan/program, dan dengan demikian dapat membantu mendapatkan dukungan para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan strategi pemecahan masalah. Terdapat dua kapabilitas utama yang menjadi pertimbangan dalam kapasitas pengambilan keputusan, seperti diantaranya adalah keefektifan dan efisiensi dalam tahap perencanaan dan komunikasi.⁴⁹

Kapabilitas perencanaan mengacu pada kemampuan pemerintah untuk dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menentukan cara-cara atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya terdapat tiga unsur yang menjadi batasan dalam perencanaan, yakni suatu pandangan di masa mendatang, tindakan merumuskan secara nyata hal yang ingin dicapai dengan menggunakan

⁴⁹ Tan. *Op. Cit.*, Hal. 69.

instrumen yang efektif dan ekonomis, serta menggunakan koordinasi dalam pelaksanaannya.⁵⁰

Adapun beberapa alasan pentingnya perencanaan seperti diantaranya adalah untuk memberi pengarah tentang hal yang hendak dilakukan dan hal yang ingin dituju. Adanya perencanaan juga dapat membimbing proses keterlibatan pemangku kepentingan dalam suatu mekanisme kerja sama, untuk kemudian dapat menciptakan suatu kondisi yang mensyaratkan adanya koordinasi guna meringkai masalah secara lebih lengkap dan menawarkan solusi yang dapat diterima secara luas bagi pihak-pihak yang terlibat. Perencanaan diharapkan dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul sekaligus menjamin tercapainya kemajuan melalui suatu tindakan. Dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu mata rantai yang esensial antara pemikiran dan pelaksanaan, yang di dalamnya memerlukan suatu kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.⁵¹

Selanjutnya, yakni kapabilitas komunikasi. Ini mengacu pada kemampuan pemerintah untuk dapat menggabungkan sarana dan proses dalam rangka pertukaran informasi dan pengetahuan di antara pihak-pihak yang terlibat. Perspektif *governance capacity* menekankan pentingnya kapabilitas komunikasi sebagai bagian dari kapasitas pengambilan keputusan yang keberadaannya dapat berkontribusi pada penguatan jaringan dan pengembangan modal sosial melalui upaya penciptaan koherensi di antara pihak-pihak yang terlibat.⁵² Atau dengan kata lain, kapabilitas komunikasi dapat memfasilitasi pembangunan yang bersifat partisipatif dan juga tindakan yang terkoordinasi, baik pada organisasi/jaringan di level yang sama (horizontal) maupun berbeda (vertikal), menyadari bahwa koordinasi hanya dapat terwujud apabila terdapat suatu informasi yang dibagikan kepada pihak-pihak terlibat.

⁵⁰ Yoeti, O.A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 49-52.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Tan. *Op. Cit.*, Hal. 70.

I.5.2.2.3 *Implementation Capacity*

Implementation capacity dalam pendekatan *governance capacity* mengacu pada sejauh mana kemampuan implementor dalam melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan atau direncanakan. Merujuk pada hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kapasitas implementasi menempatkan dimensi sumber daya manusia sebagai aspek penting dalam pengukuran kapasitas tata kelola, yang diantaranya meliputi kapabilitas manajerial dan kapabilitas individu sumber daya manusia aparatur itu sendiri.⁵³

Pertama, kapabilitas manajerial, didefinisikan sebagai kemampuan manajer untuk dapat menjalankan praktik dan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup kemampuan manajer untuk dapat melihat unsur-unsur yang ada di organisasi sebagai satu kesatuan, lalu mengoptimalkannya menuju arah pencapaian tujuan. Ini juga mencakup kemampuan manajer untuk dapat membuat keputusan, mendelegasikan wewenang, serta mengkoordinasikan dan menggerakkan anggota organisasi menuju arah pencapaian tujuan. Sehingga, kapabilitas manajerial ini tidak lain menjadi kebutuhan bagi setiap pemimpin untuk mendorong peningkatan kinerja tim dalam organisasi yang dipimpinnya. Kedua, kapabilitas sumber daya manusia. Ini mengarah pada kualitas aparatur pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kuantitasnya agar terjadi keseimbangan dan efektivitas dalam pelaksanaan tata kelola publik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kualitas dan kecukupan aparatur pemerintah.⁵⁴

I.5.2.2.4 *Local (Institutional) Capacity*

Local capacity atau yang dapat disebut sebagai kapasitas kelembagaan merujuk pada kondisi sekitar yang turut mempengaruhi kinerja tata kelola organisasi, seperti diantaranya sistem hukum, dinamika ekonomi, modal sosial, dan juga keterwakilan masyarakat yang terorganisir. Konsep umumnya mengacu pada sejauh mana aturan dan prosedur dapat memungkinkan para aktor untuk bekerja

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

sama untuk memecahkan masalah kolektif. Sehingga, adanya kapasitas ini menekankan pada pengaturan kelembagaan yang menentukan aturan main para aktor dalam berinteraksi.

Masih dalam konteks yang sama, dimensi kapasitas kelembagaan juga bertumpu pada asumsi bahwa struktur sosial tertentu adalah fundamental bagi kinerja pemerintahan. Salah satu konsep inti dalam kapasitas ini adalah modal sosial, dimana keberadaannya dapat memfasilitasi tindakan terkoordinasi dan membantu menyediakan sumber daya untuk kemitraan. Terakhir, dapat diketahui bahwa kapasitas kelembagaan berkonotasi dengan ekspektasi eksternal dari tata kelola publik, yakni interaksi antara harapan masyarakat, sumber daya, dan permasalahan yang ada dalam masyarakat yang memerlukan suatu respon tindakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.⁵⁵

I.5.3 Program

Program dapat dipahami sebagai rangkaian dari implementasi kebijakan. Berawal dari adanya suatu kebijakan, terdapat dua pilihan langkah yang dapat ditempuh untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pilihan pertama, langsung mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program, atau pilihan kedua, mengimplementasikan kebijakan melalui turunan dari kebijakan tersebut. Jika rangkaian implementasi jatuh pada pilihan pertama, maka dimulai dari program, program tersebut dapat diturunkan ke bentuk proyek, dan proyek dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Sehingga, program dalam hal ini merupakan instrumen yang membawa suatu misi untuk mencapai visi yang diharapkan, untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk rencana yang di dalamnya memuat strategi-strategi tertentu.⁵⁶

Masih dalam konteks yang sama, program juga diartikan sebagai kumpulan dari proyek yang dirancang untuk melaksanakan suatu kegiatan, dimana hal ini dilakukan secara selaras untuk mencapai keseluruhan sasaran dari kebijakan

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 63-64.

⁵⁶ Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal. 158-160.

tertentu. Setidaknya terdapat dua pengertian untuk istilah program. Pertama, secara umum program dapat diartikan sebagai suatu bentuk rencana yang akan dilakukan. Kedua, program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.⁵⁷

Definisi program selanjutnya adalah suatu cara yang dilakukan untuk pencapaian tujuan, dengan menekankan pada beberapa karakteristik program, yakni memerlukan staf sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana, memiliki anggaran pelaksanaan, serta memiliki suatu identitas tersendiri yang jika dapat berjalan secara efektif, maka keberadaannya dapat diakui oleh publik.⁵⁸ Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Dari beberapa definisi program yang telah disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program adalah alat dari suatu kebijakan, yang di dalamnya memuat serangkaian tindakan yang tersusun secara terencana, sistematis, dan didukung oleh adanya sumber daya tertentu. Program dilakukan sebagai rangkaian dari implementasi kebijakan yang dibuat sekaligus diarahkan dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.

I.5.4 Pariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai jenis-jenis kegiatan wisata yang didukung oleh beragam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kegiatan wisata

⁵⁷ Arikunto. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 78-79.

⁵⁸ *Ibid.*

yang dimaksud adalah kegiatan perjalanan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara. Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata ini bersifat multidimensi dan multidisiplin, muncul sebagai suatu kebutuhan setiap orang dan negara, serta hadir sebagai wujud interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan juga pengusaha, dimana konsep ini terangkum dalam apa yang disebut dengan kepariwisataan.

Gambaran pariwisata sebagai suatu industri didefinisikan untuk menggambarkan pariwisata secara konkret, yakni untuk meyakinkan setiap individu bahwa pariwisata dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian, utamanya adalah dampak dari *multiplier effect* yang ditimbulkannya, yang kemudian menjadi katalisator dalam pembangunan.⁵⁹ Pariwisata juga didefinisikan oleh MacIntosh sebagai sejumlah gejala dan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi antara wisatawan di satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah, serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik sekaligus melayani wisatawan tersebut.⁶⁰

Definisi pariwisata tersebut menekankan pada hubungan antara wisatawan (sebagai orang yang melakukan perjalanan wisata) dengan tiga unsur utama pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pembangunan pariwisata. Yakni, pemerintah yang berwenang menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengarahkan agar wisatawan dapat dilayani dengan baik. Kemudian, para pemasok atau dunia usaha yang menyediakan kebutuhan, keinginan, dan pelayanan melalui pemanfaatan sumber daya modal dan jaringan yang dimiliki. Serta terakhir, yakni masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah (*host*) sekaligus pelaku dari pengembangan pariwisata, dimana ini dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.⁶¹

⁵⁹ Yoeti, O.A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 11.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Yoeti. *Op. Cit.*, Hal. 9.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pariwisata dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung oleh beragam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, untuk kemudian dikunjungi oleh wisatawan dalam waktu yang sementara sebagai unsur pemenuhan kebutuhan manusia, serta penciptaan keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan hidup dengan dimensi sosial.

I.5.4.1 Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu bentuk penerapan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan.⁶² Hal yang selaras dikemukakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI bahwa desa wisata adalah bagian dari pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, dimana ini menjadi salah satu program pemerintah untuk mengakselerasi kebangkitan pariwisata dan perekonomian.⁶³ Masih dalam konteks yang sama, Inskeep menyatakan desa wisata sebagai wujud pengembangan pariwisata yang menggerakkan kunjungan wisatawan ke suatu struktur kehidupan masyarakat desa.⁶⁴ Ini menekankan definisi desa wisata pada bentuk penyatuan antara daya tarik wisata, akomodasi, fasilitas, dan layanan pariwisata yang dikemas secara khas dan alami dalam struktur kehidupan masyarakat desa sebagai usaha untuk menarik minat wisatawan.

Pengembangan pariwisata pedesaan dapat menghadirkan beragam manfaat tersendiri. Beberapa diantaranya seperti peningkatan potensi kewirausahaan lokal, tumbuhnya perekonomian masyarakat lokal, diversifikasi produk pariwisata, hingga pada revitalisasi budaya lokal. Keseluruhan manfaat tersebut, pada dasarnya, dapat tercapai apabila suatu desa memiliki kapasitas kelembagaan lokal yang kuat. Selain penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pengembangan pariwisata pedesaan juga perlu memperhatikan keseimbangan

⁶² Arida, I.N.S., & Pujiani, I.P.K. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desawisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 1-9.

⁶³ Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2021). *Desa Wisata Terus Tumbuh Sebagai Pariwisata Alternatif*. Dilansir dari <https://www.kemenparekraf.go.id/kebijakan/Desa-Wisata-Terus-Tumbuh-Sebagai-Pariwisata-Alternatif+&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id>, pada 15 Januari 2022.

⁶⁴ Arida & Pujiani. *Op. Cit.*, Hal. 3.

antara aspek lingkungan hidup dengan pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan desa wisata tersebut. Ini penting dilakukan utamanya untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Sehingga, pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui desa wisata tersebut dapat mencapai orientasi sebagaimana yang dikehendaki tanpa menciderai kelestarian alam lingkungan.⁶⁵

Tidak setiap desa dapat dijadikan sebagai desa wisata. Setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi bagi suatu desa yang ingin mengembangkan pariwisata pedesaan. Pertama, adanya basis data terkait potensi desa yang secara jelas dapat tersedia, termasuk di dalamnya adalah keberadaan ekosistem yang dapat membantu pengembangan pariwisata. Kedua, adanya minat, dukungan, partisipasi, dan kesiapan masyarakat setempat dalam mengembangkan pariwisata, termasuk di dalamnya adalah aspek kelembagaan. Ketiga, adanya konsep desa wisata yang berbeda dari konsep desa wisata lainnya. Ini mengindikasikan bahwa setiap desa wisata harus memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing, dimana kekhasan dan keunikan inilah yang pada akhirnya menjadi nilai tambah (*added value*) pariwisata yang akan dikembangkan.⁶⁶

I.5.4.2 Pengembangan Desa Wisata

Secara terminologi, istilah pengembangan mengandung pengertian sebagai proses, cara, atau perbuatan mengembangkan suatu hal yang menjadikan hal tersebut bertambah maju, luas, lebih sempurna.⁶⁷ Pengembangan juga identik dengan suatu keinginan yang mengarah pada perbaikan kondisi dengan disertai penggunaan kemampuan tertentu untuk mewujudkannya. Ini selaras dengan apa yang dikemukakan Nugraha bahwa pengembangan merupakan suatu proses, perbuatan, atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan antara

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Kemenparekraf/Baparekraf RI. *Op. Cit.*

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari <https://kbbi.web.id/kembang>, pada 15 Januari 2022.

penggunaan sumber daya dengan keinginan menuju perbaikan kondisi guna mencapai tujuan yang dikehendaki.⁶⁸

Atas dasar definisi pengembangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan desa wisata adalah suatu upaya terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan potensi, sumber daya wisata, sekaligus pemanfaatannya melalui suatu pengaturan kebijakan, dimana hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup guna pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.⁶⁹ Pengembangan desa wisata juga dapat diidentifikasi sebagai usaha terkoordinasi yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan melalui penyediaan semua hal yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, barang dan jasa, serta beragam fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.⁷⁰

Alasan utama pengembangan desa wisata pada suatu daerah tujuan wisata sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian di suatu daerah tersebut. Ini mengindikasikan bahwa akan selalu ada perhitungan mengenai keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari dikembangkannya suatu desa wisata.⁷¹ Seperti halnya ketika desa wisata dapat berkembang dengan baik, maka keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, menciptakan tingkat permintaan baru terhadap barang dan jasa di suatu daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat kekayaan alam dan budaya sebagai aset pariwisata, serta menghendaki adanya proses pertukaran pikiran antara wisatawan dengan masyarakat yang dapat membawa dampak baik bagi daerah tersebut.⁷²

Terkait dengan komponen pengembangan pariwisata, Cooper dkk menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat komponen utama yang berperan

⁶⁸ Nugraha, R. (2020). Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Wisata Umbul Ponggok Kabupaten Klaten. *Skripsi*, Universitas Airlangga.

⁶⁹ Peraturan Desa Mendak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengembangan Desa Wisata.

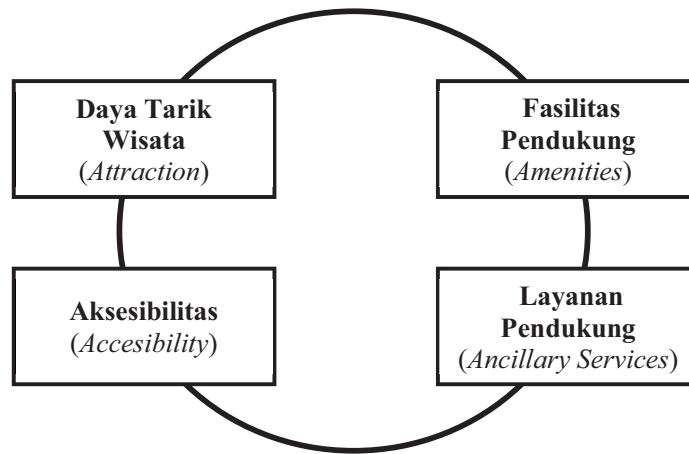
⁷⁰ Chaerunissa, S.F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 159-175.

⁷¹ Yoeti. *Loc. Cit.*, Hal. 77.

⁷² Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata. (2012). Hal. 33-34.

sebagai unsur pembentuk destinasi pariwisata, dimana dalam hal ini adalah desa wisata. Keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut.⁷³

Gambar I.5 Komponen Pengembangan Desa Wisata



Sumber: Diadaptasi dari Cooper dkk dalam Sunaryo (2013)

I.5.4.2.1 Pembangunan Daya Tarik Wisata (*Attraction*)

Daya tarik wisata dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, keunikan, dan/atau keindahan yang menjadi tujuan atau sasaran kunjungan wisatawan. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Cooper dkk bahwa daya tarik wisata dapat memberikan motif awal bagi para wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi pariwisata. Pun demikian dengan pendapat Yoeti yang menyatakan objek pariwisata dan segala atraksi yang diperlihatkan merupakan daya tarik utama, mengapa seseorang datang berkunjung pada suatu tempat.⁷⁴ Sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dalam hal ini disebut dengan modal atau sumber daya kepariwisataan (*tourism resources*), seperti diantaranya modal potensi alam yang mencakup semua unsur keanekaragaman kekayaan alam (*natural resources*). Kemudian, modal potensi budaya, layaknya tempat bersejarah,

⁷³ Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. Hal. 160.

⁷⁴ Yoeti. *Loc. Cit.*, Hal. 100.

situs, dan tradisi-tradisi masyarakat. Serta terakhir yakni modal potensi manusia atau yang disebut sebagai segala hasil buatan manusia.

I.5.4.2.2 Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas dapat dimaknai sebagai tingkat keterjangkauan suatu daerah pariwisata oleh wisatawan. Atau dengan kata lain, ukuran kemudahan wisatawan dalam melakukan perjalanan dari lokasi asal ke lokasi daerah wisata. Aksesibilitas juga sering dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh wisatawan untuk dapat mencapai tujuan daerah wisata. Sehingga, aksesibilitas adalah segenap sarana dan prasarana yang digunakan oleh wisatawan untuk menjangkau tujuan daerah wisata. Beberapa hal diantaranya meliputi waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, rute atau pola perjalanan, kondisi jalan yang dilalui, serta dukungan sistem transportasi lainnya.⁷⁵ Tanpa aksesibilitas yang memadai, maka tentunya ini akan mempengaruhi motif wisatawan yang akan berkunjung. Dengan demikian, pentingnya aksesibilitas sebagai komponen pengembangan pariwisata adalah berkaitan dengan keberhasilan pengembangan pariwisata itu sendiri.

I.5.4.2.3 Pembangunan Fasilitas Pendukung (*Amenities*)

Fasilitas pendukung pariwisata merupakan seluruh fasilitas yang ditujukan untuk melayani segala kebutuhan dan permintaan wisatawan, menunjang kenyamanan dan keselamatan wisatawan, serta memberi kemudahan bagi wisatawan sehingga memungkinkan wisatawan tinggal lebih lama atau bahkan berkunjung kembali ke daerah tujuan wisata tersebut. Fasilitas pendukung pariwisata juga dapat dipahami sebagai segala bentuk kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan seluruh unsur kepariwisataan dapat beroperasi dan berfungsi dengan semestinya, serta memungkinkan pariwisata menjadi lebih hidup dan berkembang. Beberapa fasilitas pendukung pariwisata ini diantaranya adalah akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, toko cinderamata, tempat perbelanjaan, dan fasilitas penunjang lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, fasilitas pendukung pariwisata bukanlah suatu hal yang menjadi daya tarik

⁷⁵ Sunaryo. *Op. Cit.*, Hal. 160.

bagi wisatawan. Akan tetapi, kurangnya beragam fasilitas tersebut akan mempengaruhi motif wisatawan untuk menghindari daerah tujuan wisata yang bersangkutan.⁷⁶

I.5.4.2.4 Pembangunan Layanan Pendukung (*Ancillary Services*)

Mengutip pendapat Sugiama dalam Chaerunissa & Yuniningsih, *ancillary service* mencakup peranan organisasi-organisasi untuk dapat memfasilitasi dan menggiatkan pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya adalah pembangunan pemasaran pariwisata. Pendapat selaras juga dikemukakan oleh Wargenau dan Deborah sebagaimana dikutip oleh Chaerunissa & Yuniningsih, bahwa *ancillary* merupakan organisasi-organisasi pengelola pariwisata. Ini berkaitan dengan kebijakan atau dukungan yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Seperti halnya, pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan organisasi lain yang turut menyelenggarakan kegiatan wisata.⁷⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan layanan pendukung adalah suatu usaha terkoordinir yang dilakukan untuk mengelola sekaligus melengkapi pelayanan yang diberikan oleh suatu industri pariwisata dengan tujuan untuk menambah citra positif pariwisata. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Irianto dalam tulisannya yang bertajuk “*Policies and Branding Tourism*” bahwa pengembangan di sektor potensial pariwisata memerlukan sebuah upaya untuk dapat menumbuhkan citra positif (*positive image building*) serta menciptakan *branding* atas lokasi dan potensi daya tarik wisata itu berada.⁷⁸

I.5.4.3 Program Pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

Pengembangan pariwisata merupakan suatu upaya terpadu dalam rangka pemanfaatan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Chaerunissa & Yuniningsih. *Op. Cit.*, Hal. 166.

⁷⁸ Irianto, J. (2017). Policies and Tourism Branding. *Prosiding Semnasfi Universitas Muhammad Sidoarjo*, 1(1): 1-12.

di suatu daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan pariwisata, tidak hanya pembangunan secara fisik, melainkan juga pembangunan kehidupan sosial masyarakat melalui dampak perubahan yang dihasilkan. Atas hal tersebut, maka program pengembangan pariwisata di desa wisata berarti proses mengembangkan pariwisata di suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi dan sumber daya untuk dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.

Program pengembangan Desa Wisata Mendak dimaksudkan untuk menata sekaligus mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.⁷⁹ Maksud tersebut tentunya berkenaan dengan hal-hal yang melatarbelakangi terwujudnya pengembangan Desa Wisata Mendak, yakni sebagai upaya pemulihan ekonomi atas kejadian bencana hama yang menyerang tanaman cengkih di lahan perkebunan milik masyarakat desa, untuk kemudian menjadikan pariwisata sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja baru.

Masih dalam konteks yang sama, program pengembangan desa wisata tersebut juga ditujukan untuk mengangkat citra Desa Mendak sebagai desa wisata yang berfungsi sebagai sarana pelestarian seni dan budaya, sarana pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, serta sarana edukatif dan rekreatif. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan kelembagaan kepariwisataan, serta promosi dan pemasaran.⁸⁰ Bentuk-bentuk pengembangan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dapat diuraikan secara lebih lanjut melalui komponen-komponen pengembangan pariwisata menurut Cooper dkk dalam Sunaryo, yang diantaranya adalah sebagai berikut.⁸¹

Pertama, pembangunan daya tarik wisata. Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mendak, maka pembangunan daya tarik wisata yang dilakukan yakni pengembangan wisata alam Watu Rumpuk, wisata

⁷⁹ Peraturan Desa Mendak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengembangan Desa Wisata.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Sunaryo. *Op. Cit.*, Hal. 160.

budaya pendakian Puncak Tapak Bimo dan intip Gua Jepang, wisata edukasi perkebunan dan olahan pangan perkebunan, atraksi *outbound* dan bumi perkemahan Watu Rumpuk, wisata buatan berupa ragam seni rupa yang menjadi spot untuk berswafoto.

Kedua, aksesibilitas wisata. Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mendak, maka aksesibilitas ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju daerah tujuan wisata, atau dalam hal ini adalah Desa Wisata Mendak. Aksesibilitas tersebut dapat berupa dukungan sistem transportasi, pola atau rute perjalanan, dan juga kondisi jalan dari pusat kota menuju Desa Wisata Mendak.

Ketiga, pembangunan fasilitas pendukung wisata. Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mendak, maka pembangunan fasilitas pendukung ini mencakup penyediaan tempat penginapan atau *homestay* di sekitar Desa Wisata Mendak, penyediaan usaha makanan khas Desa Wisata Mendak, penyajian ragam hiburan, penyajian aktivitas masyarakat Desa Mendak terkait dengan budidaya tanaman perkebunan, serta penyediaan pusat keamanan pariwisata di Desa Wisata Mendak.

Keempat, pembangunan layanan pendukung wisata. Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Mendak, maka pembangunan layanan pendukung ini meliputi usaha-usaha terkoordinir yang dapat menambah citra positif pariwisata. Seperti halnya usaha informasi, promosi, dan pemasaran pariwisata di Desa Wisata Mendak melalui berbagai kanal media.

I.5.5 Governance Capacity dalam Program Pengembangan Desa Wisata

Governance capacity dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk dapat menerapkan strategi yang melibatkan adanya pengaturan sumber sumber daya, perencanaan dan pengambilan keputusan, serta pelaksanaan suatu tindakan bersama dengan pemangku kepentingan yang terlibat guna mewujudkan suatu tujuan yang merepresentasikan kepentingan kolektif. Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, maka terlihat jelas bahwa *governance capacity* menjadi

salah satu hal yang menentukan sejauh mana pengembangan desa wisata itu dapat mencapai keberhasilannya.⁸²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall, bahwa *governance capacity* menjadi konsep kunci dalam kebijakan publik yang semakin banyak digunakan dalam pariwisata. Sehingga, memahami kapasitas tata kelola merupakan hal yang penting untuk mengetahui cara pemerintah bertindak di arena kebijakan pariwisata, serta untuk menentukan instrumen atau indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.⁸³ *Governance capacity* juga menjadi sebuah praktik pemerintahan yang terukur, yang bertujuan untuk mengarahkan sektor pariwisata secara lebih efektif melalui jaringan pemangku kepentingan yang saling terkoordinasi, saling ketergantungan, dan memiliki tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kepariwisataan.⁸⁴ Dengan demikian, agar pengembangan desa wisata dapat memberikan luaran sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat, serta juga dapat memberikan pengalaman yang bernilai bagi wisatawan, maka dibutuhkan unsur kapasitas tata kelola yang memadai di dalamnya.⁸⁵

Relevansi antara *governance capacity* dengan pengembangan desa wisata dapat dilihat dari keterkaitan masing-masing dimensi *governance capacity* dengan keempat bentuk pengembangan desa wisata. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan relevansi antara *governance capacity* dengan pengembangan desa wisata, dimana dalam hal ini adalah program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

⁸² Valente, F., Dredge, D., & Lohmann. (2015). Leadership and Governance in Regional Tourism. *Journal of Destination Marketing & Management*.

⁸³ Hall. (2011). A typology of Governance and Its Implications for Tourism Policy Analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 437-457.

⁸⁴ Fuentes, C.D. (2013). *Governance for The Tourism Sector and Its Measurement*. United Nations World Tourism Organization (UNWTO).

⁸⁵ *Ibid.*

Tabel I.8 Relevansi Antara *Governance Capacity* dengan Pengembangan Desa Wisata

Dimensi <i>Governance Capacity</i>	Bentuk-Bentuk Pengembangan Desa Wisata			
	Pembangunan Daya Tarik Wisata	Aksesibilitas Wisata	Pembangunan Fasilitas Pendukung Wisata	Pembangunan Layanan Pendukung Pariwisata
<i>Mobilization capacity</i>	<p>Hubungan dimensi pertama (<i>mobilization capacity</i>) dengan bentuk-bentuk pengembangan desa wisata. Segala bentuk pengembangan desa wisata membutuhkan kapasitas organisasi dan kapasitas jaringan pemangku kepentingan untuk dapat melakukan pengaturan sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi:</p> <p>(1) Sumber daya keuangan, dan</p> <p>(2) Sumber daya material (sumber daya fisik)</p> <p>Yang dimanfaatkan dan dikerahkan dalam pembangunan daya tarik wisata, aksesibilitas pariwisata, pembangunan fasilitas serta layanan pendukung pariwisata.</p>			
<i>Decision-Making Capacity</i>	<p>Hubungan dimensi kedua (<i>decision-making capacity</i>) dengan bentuk-bentuk pengembangan desa wisata. Segala bentuk pengembangan desa wisata membutuhkan kapasitas organisasi dan kapasitas jaringan pemangku kepentingan untuk dapat membuat keputusan yang responsif dan representatif terhadap kepentingan bersama. Keputusan tersebut dapat dicapai apabila terdapat kapabilitas perencanaan dan komunikasi yang memadai di antara pemangku kepentingan yang terlibat.</p> <p>(1) Kapabilitas perencanaan memuat penentuan arah/tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan desa wisata dan strategi dalam mencapai tujuan tersebut.</p> <p>(2) Sementara kapabilitas komunikasi mengacu pada bentuk komunikasi yang terjalin di antara pemangku kepentingan yang memfasilitasi adanya tindakan terkoordinasi dalam pembangunan daya tarik wisata, aksesibilitas wisata, pembangunan fasilitas, serta layanan pendukung wisata.</p>			
<i>Implementation Capacity</i>	<p>Hubungan dimensi ketiga (<i>implementation capacity</i>) dengan bentuk-bentuk pengembangan desa wisata. Segala bentuk pengembangan desa wisata membutuhkan kapasitas organisasi dan kapasitas jaringan pemangku kepentingan sebagai sumber daya pelaksana. Sehingga, sejauh mana kualitas kepariwisataan dapat ditentukan oleh:</p> <p>(1) Kemampuan manajer (pemimpin) organisasi dalam menggerakkan segala bentuk pengembangan desa wisata sebagai satu-kesatuan unsur; serta</p> <p>(2) Kemampuan SDM pariwisata dalam melaksanakan strategi pengembangan desa wisata itu sendiri.</p>			

<i>Local/ Institutional Capacity</i>	<p>Hubungan dimensi keempat (<i>local/institutional capacity</i>) dengan bentuk-bentuk pengembangan pariwisata. Sejauh mana bentuk-bentuk pengembangan pariwisata dapat berjalan dan mencapai tujuan yang dikehendaki salah satunya dapat dipengaruhi oleh keberadaan kapasitas lokal/kelembagaan yang memadai. Seperti diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Konsistensi dan kejelasan kerangka regulasi yang menentukan aturan main suatu organisasi dan jaringan pemangku kepentingan dalam berinteraksi; serta (2) Dukungan masyarakat sebagai modal sosial yang memfasilitasi bentuk-bentuk pengembangan pariwisata, seperti halnya pembangunan daya tarik wisata, aksesibilitas wisata, pembangunan fasilitas, serta layanan pendukung wisata.
--	--

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan uraian pada Tabel I.8 di atas, dapat dipahami bahwa setiap dimensi dalam *governance capacity* merepresentasikan kapasitas pemerintah dan jaringan pemangku kepentingan terkait tindakannya dalam upaya pengembangan desa wisata, yang pada akhirnya menentukan sejauh mana upaya pengembangan desa wisata tersebut dapat berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

I.6 Definisi Konsep

Istilah konsep mengandung pengertian hasil abstraksi dari suatu realitas empiris. Definisi konsep ini dimaksudkan untuk memberi gambaran sekaligus batasan mengenai fokus penelitian. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Program adalah rangkaian dari implementasi kebijakan yang memuat tindakan-tindakan yang tersusun secara terencana dan sistematis, didukung oleh adanya sumber daya tertentu, serta diarahkan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
2. Pariwisata adalah berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung oleh beragam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, untuk kemudian dikunjungi oleh wisatawan dalam waktu yang sementara sebagai unsur pemenuhan kebutuhan manusia, serta penciptaan keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan hidup dengan dimensi sosial.
3. Desa wisata adalah bentuk penerapan pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, akomodasi, fasilitas dan layanan

pendukung pariwisata dalam struktur kehidupan masyarakat desa sebagai usaha untuk menarik minat wisatawan.

4. Pengembangan desa wisata adalah suatu upaya terpadu dalam rangka pemanfaatan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di suatu desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan pariwisata, tidak hanya pembangunan secara fisik, melainkan juga pembangunan kehidupan sosial masyarakat melalui dampak perubahan yang dihasilkan.
5. Program pengembangan desa wisata adalah proses mengembangkan pariwisata di suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi dan sumber daya untuk dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.
6. *Governance capacity* adalah kapasitas pemerintah dalam memobilisasi sumber daya, mengambil keputusan, dan melaksanakan suatu tindakan kolektif bersama dengan aktor-aktor lain yang terlibat.
7. *Mobilization capacity* adalah kapasitas pemerintah dalam memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk membentuk mekanisme tata kelola.
8. *Decision-making capacity* adalah kapasitas pemerintah dalam memilih alternatif terbaik sebagai bentuk keputusan yang responsif dan representatif terhadap kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme tata kelola.
9. *Implementation capacity* adalah kapasitas pelaksana dalam melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan atau direncanakan dengan menempatkan dimensi sumber daya manusia sebagai aspek penting dalam pengukuran kapasitas tata kelola.
10. *Local/Institutional capacity* adalah kondisi sekitar yang mempengaruhi kinerja tata kelola organisasi dan menentukan aturan main para aktor dalam berinteraksi, seperti diantaranya kerangka regulasi, dinamika ekonomi, modal sosial, dan juga keterwakilan masyarakat yang terorganisir.

I.7 Metode Penelitian

Secara sederhana, metode penelitian dapat dipahami sebagai berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya.⁸⁶ Metode penelitian juga dipahami sebagai seperangkat petunjuk untuk menjawab permasalahan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif dengan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian berupa studi kasus. Berikut ini diuraikan alasan pemilihan pendekatan, metode, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan interpretif (*interpretive social science approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dimana pendekatan tersebut menekankan pada aksi atau tindakan sosial yang bermakna, dikonstruksi secara sosial, dan memiliki relativisme nilai.⁸⁷ Pendekatan interpretif dilakukan sebagai bentuk dari analisis terstruktur melalui pengamatan yang mendalam terhadap individu dengan pengaturan alami guna memahami sekaligus menafsirkan bagaimana individu membangun/mempertahankan kehidupan sosial mereka.⁸⁸ Hal selaras juga dikemukakan oleh Levers bahwa pendekatan interpretif menitikberatkan pada langkah peneliti untuk dapat memahami, mempelajari, dan memberikan makna yang berkenaan dengan tindakan sosial.⁸⁹ Untuk melakukan hal demikian, maka dalam pendekatan interpretif, peneliti harus mendekati diri sekaligus mengenal baik pada individu ataupun kelompok agar memperoleh pembelajaran dari berbagai sudut pandang untuk kemudian dapat memberikan penafsiran atas makna sosial yang terjadi.

Selanjutnya terkait dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti fenomena dari hasil konstruksi sosial dalam menjawab rumusan masalah yang selaras dengan tujuan penelitian ini, yaitu

⁸⁶ Creswell, J.W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat [Terjemahan]. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 332.

⁸⁷ Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. London: Pearson Education Limited. Hal 103.

⁸⁸ *Ibid.* Hal. 104.

⁸⁹ Levers, M.J.D. (2013). Philosophical Paradigms, Grounded Theory, and Perspectives on Emergence. *Sage Open*, 3(4), 1-6.

mengetahui dan memahami program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif *governance capacity*. Ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk menggali dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial.⁹⁰ Beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif, seperti diantaranya berada pada *setting* yang alamiah; berpijak pada dasar bahwa peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data; melibatkan beberapa teknik pengumpulan data; bersifat induktif; didasarkan pada makna partisipan; kerap kali menyertakan perspektif teoritis; bersifat interpretif dan holistik; serta menyajikan laporan akhir penelitian dengan kerangka yang cukup fleksibel.⁹¹

Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini juga dapat menggambarkan kapasitas para pemangku kepentingan yang terlibat, baik itu dalam lingkup internal maupun eksternal, secara lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan realitas fenomena yang terjadi. Sehingga tidak hanya mengukur sejauh mana kapasitas yang ada dan menjawab pertanyaan apa, melainkan juga bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Dimana hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Tracy, bahwa temuan data pada metode penelitian kualitatif tidak hanya bagus untuk menjawab pertanyaan “apa”, melainkan juga menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana bisa”. Sehingga dapat memberikan temuan berharga terkait hubungan kausalitas tentang prediksi, tindakan, ataupun perubahan.⁹²

Secara lebih lanjut, dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis penelitian. Seperti diantaranya yaitu penelitian naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.⁹³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell bahwa jenis penelitian studi kasus mengembangkan analisis mendalam

⁹⁰ Creswell. *Loc. Cit.*, Hal. 4-5.

⁹¹ *Ibid.*, Hal. 284.

⁹² Tracy, S.J. (2020). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Second Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc. Hal. 26.

⁹³ Creswell. *Loc. Cit.*, Hal. 18-19.

tentang suatu kasus, program, peristiwa, aktivitas, ataupun proses.⁹⁴ Pun demikian dengan apa yang dinyatakan oleh Yin, bahwa untuk menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana” keberhasilan/kegagalan suatu program, maka langkah yang digunakan yakni dengan melakukan percobaan lapangan atau menggunakan studi kasus.⁹⁵ Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini karena peneliti berupaya untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendeskripsikan program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan berdasarkan pada perspektif *governance capacity*.

I.7.1 Tipe Penelitian

Terkait dengan tipe penelitian, setidaknya terdapat tiga jenis tipe penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, seperti diantaranya tipe penelitian eksplanatif, eksploratif, dan deskriptif.⁹⁶ Berkenaan dengan hal tersebut, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk melukiskan gambaran yang spesifik dari situasi, latar sosial, dan hubungan dengan menjawab beberapa pertanyaan, seperti diantaranya bagaimana, dimana, kapan, dan siapa.⁹⁷ Hal ini selaras dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu “bagaimana gambaran program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ditinjau dari perspektif *governance capacity*?” Informasi yang disajikan dalam penelitian deskriptif juga bersumber dari informan-informan di lapangan tanpa harus bergantung pada pengukuran angka. Sehingga, penelitian deskriptif ini akan berupaya menjawab rumusan masalah dengan mendeskripsikan fenomena sebagaimana yang telah disebutkan secara terperinci.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Yin, R.K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Fifth Edition. USA: Sage Publication. Hal. 37.

⁹⁶ Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. Pearson Education Limited. Hal. 43.

⁹⁷ *Ibid.*, Hal. 22.

I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah atau tempat dilakukannya kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, yaitu di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

Pertimbangan yang menyertai pemilihan Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebagai lokasi penelitian ini adalah keberhasilan program pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mendak, yang keberadaannya mampu memulihkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa setempat pasca kejadian bencana hama yang menyerang salah satu komoditas utama masyarakat Desa Mendak. Dipilihnya Desa Mendak sebagai lokus penelitian ini juga dikarenakan keberadaannya yang menjadi salah satu desa percontohan (*pilot project*) oleh desa-desa di daerah lain. Hal ini tercermin dari banyaknya pemerintah daerah lain yang melakukan studi tiru terhadap Pemerintah Desa Mendak. Seperti yang terjadi pada tahun 2020, setidaknya terdapat 13 kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang melakukan studi tiru ke Desa Mendak.

Selain di Desa Mendak, lokasi penelitian juga dilakukan di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun sebagai instansi yang menaungi kepariwisataan di daerah setempat, serta di Kantor Perhutani KPH Lawu Ds. sebagai pihak yang menjalin kemitraan dengan Pemerintah Desa Mendak dalam hal pengembangan pariwisata. Penyertaan berbagai pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini dilakukan sebagai usaha mendapatkan keabsahan dalam perolehan data di lapangan.

I.7.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan yang dianggap dapat memberikan informasi secara tepat dan relevan dengan tujuan penelitian. Ini selaras dengan hal yang dikemukakan oleh Creswell bahwa gagasan di balik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan

penuh perencanaan (*purposefully select*).⁹⁸ Penggunaan teknik *purposive* dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan pelbagai data sesuai dengan kriteria informan yang telah ditentukan.⁹⁹ Dengan demikian, penelitian ini akan dapat memperluas deskripsi informasi, mengetahui variasi informasi, dan mengulas secara lebih mendalam terkait program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif *governance capacity*.

Berikut ini merupakan informan-informan yang secara *purposive* dipilih dalam penelitian ini.

1. Ibu Nur Cholifah, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, masa jabatan 2016-2021 dan 2021-2026.
Kepala Desa Mendak dipilih menjadi informan dalam penelitian ini karena memahami betul bagaimana perjalanan terbentuknya Desa Wisata Mendak dan menjadi sosok yang memprakarsai program pengembangan Desa Wisata Mendak.
2. Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
Sekretaris Desa Mendak dipilih menjadi informan dalam penelitian ini karena memahami sisi historis Desa Mendak dan terlibat langsung dalam tata kelola program pengembangan Desa Wisata Mendak, mulai dari pengaturan sumber daya, perencanaan dan pengambilan keputusan, hingga pada implementasi.
3. Bapak Didik Asrofi, S.H. selaku Sekretaris BUMDes Usaha Mandiri Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
Informan tersebut dipilih karena memiliki informasi yang memadai terkait keberadaan sektor wisata sebagai salah satu unit usaha dari BUMDes. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang peran dan keterlibatan BUMDes dalam perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Lawu Ds dan LMDH, pembangunan *tourism branding*, hingga pengelolaan potensi ekonomi desa.

⁹⁸ Creswell. *Loc. Cit.*, Hal. 253.

⁹⁹ Neuman. *Loc. Cit.*, Hal. 22.

4. Bapak Supriyono selaku Ketua Pokdarwis Panorama Wilis Desa Mendak, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
Ketua Pokdarwis dipilih menjadi informan dalam penelitian ini karena turut berperan sebagai penggerak kelompok masyarakat dalam aktivitas pembangunan kepariwisataan melalui perwujudan tujuh nilai Sapta Pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.
5. Bapak Yono selaku Wakil Ketua LMDH Wono Panguripan Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
Informan tersebut dipilih karena memahami dan terlibat langsung dalam perjanjian kerjasama pengembangan Desa Wisata Mendak melalui perannya sebagai pihak kedua, yakni LMDH pihak penghubung antara kepentingan desa dengan kepentingan Perhutani dalam rangka pengaturan wilayah hutan di lingkungan Desa Mendak untuk tujuan wisata.
6. Bapak Mokh. Hamzah Nugrohanto, S.E. selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun.
Informan tersebut dipilih karena terlibat langsung dalam fasilitasi program pengembangan Desa Wisata Mendak, mulai dari konsultasi *grand design* wisata, pengadaan pelatihan bagi Pokdarwis, dan pendampingan kelembagaan desa wisata.
7. Bapak Sujiono selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (PMP) Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
Informan tersebut dipilih karena terlibat langsung dalam fasilitasi program pengembangan Desa Wisata Mendak, seperti pendampingan saat proses perencanaan dan saat mengikuti lomba-lomba pariwisata, baik di tingkat daerah kabupaten/provinsi maupun tingkat nasional.
8. Bapak Darwitono selaku Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, dan Komunikasi Perusahaan Perhutani KPH Lawu Ds.
Informan tersebut dipilih karena mengetahui detail informasi terkait perjanjian kerjasama pengembangan Desa Wisata Mendak melalui perannya sebagai pihak pertama, yakni Perum Perhutani KPH Lawu Ds selaku pemilik lahan di area Desa Wisata Mendak.

9. Masyarakat Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
Masyarakat Desa Mendak yang dipilih menjadi informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang terdampak bencana alam hama, masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan kepariwisataan, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam penyediaan kegiatan wisata. Masyarakat Desa Mendak yang dipilih menjadi informan diantaranya adalah sebagai berikut.
 - a. Ibu Anisa selaku penjual di foodcourt Watu Rumpuk.
 - b. Ibu Etiyo selaku penjual di lapak UMKM Watu Rumpuk.
 - c. Ibu Ani Lestari selaku ketua kelompok paket wisata olahan perkebunan di Desa Wisata Mendak.
 - d. Bapak Watno selaku ketua kelompok karawitan “Sekar Laras” Desa Wisata Mendak.
 - e. Ibu Warti selaku masyarakat petani/pekebun Desa Wisata Mendak.
10. Ibu Jumiaty selaku masyarakat Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

Salah seorang masyarakat Desa Segulung dipilih menjadi informan dalam penelitian ini karena turut merasakan dampak positif atas dikembangkannya Desa Wisata Mendak, menyadari letak Desa Segulung yang bersebelahan dengan Desa Wisata Mendak dan berada pada satu jalur akses.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan dalam penelitian karena melalui data tersebut, peneliti dapat mengetahui fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara langsung dan secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil observasi dan wawancara mendalam. Adapun data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber-sumber lain yang telah diolah. Sehingga, peneliti menjadi tangan kedua dalam pengolahan data. Data

sekunder dalam penelitian ini, yaitu studi literatur serta materi dokumentasi (audio dan visual).

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini mengikuti gagasan pendekatan saturasi (kejenuhan), dimana proses pengumpulan data akan berhenti ketika kategori/tema telah terpenuhi. Selain itu, peneliti juga menghentikan proses pengumpulan data ketika data segar tidak lagi mengungkapkan gagasan-gagasan yang baru.¹⁰⁰ Secara lebih lanjut, berikut ini dipaparkan teknik pengumpulan data oleh peneliti.

I.7.4.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dari individu di lokasi penelitian, lalu mencatat/merekamnya secara terstruktur maupun semi-struktur.¹⁰¹

Dalam penelitian ini, teknik observasi dilakukan dengan memposisikan diri sebagai salah satu pengunjung di Desa Wisata Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seluruh aktivitas yang sedang berlangsung serta mengamati kondisi desa wisata dan lingkungan di sekitarnya, termasuk di dalamnya adalah daya tarik wisata, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung pariwisata yang tersedia. Hasil observasi tersebut dicatat/direkam oleh peneliti sebagai bagian dari data yang menunjang hasil penelitian.

I.7.4.2 Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Metode wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada informan-informan sebagaimana yang telah ditentukan, baik itu secara *face-to-face* (tatap muka), secara daring/telepon, maupun secara kelompok yang terlibat dalam *focus group interview*. Metode wawancara pada umumnya bersifat *open-ended*. Ini berarti bahwa dalam penelitian dapat diajukan

¹⁰⁰ Creswell. *Loc. Cit.*, Hal. 254.

¹⁰¹ *Ibid.*

pertanyaan umum kepada partisipan, yang memungkinkan partisipan untuk dapat memberikan pandangan dan opini mereka secara bebas.¹⁰²

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam teknik pengumpulan data guna memperoleh deskripsi penjelasan yang komprehensif sekaligus opini dari informan-informan terkait program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dalam perspektif *governance capacity*.

I.7.4.3 Studi Literatur

Selama proses penelitian berlangsung, penelitian juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, seperti halnya dokumen publik (laporan pemerintah, data statistik, dan berita) ataupun dokumen privat (buku dan jurnal). Hal ini dimaksudkan selain untuk memberi kemudahan akses, juga untuk memperkuat data yang sudah ada (studi terdahulu) sekaligus data sekunder yang mungkin tidak dapat terpenuhi saat penelitian di lapangan.¹⁰³

I.7.4.4 Materi Audio dan Visual

Teknik pengumpulan data yang terakhir dalam penelitian ini yaitu materi audio dan visual, seperti halnya foto, video, rekaman suara, dan objek seni lainnya.¹⁰⁴ Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan segala jenis tindakan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, sehingga dapat terjamin bukti keaslian (autetik) dan kredibilitas dari penelitian ini.

I.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data hasil penelitian, maka penelitian ini menggunakan triangulasi sumber daya informasi yang berbeda, dimana hal ini dilakukan dengan memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, Hal. 255-256.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Hal. 257.

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian digunakan dalam membangun justifikasi secara koheren.¹⁰⁵

Berikut merupakan tahapan triangulasi data menurut Miles dkk yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.¹⁰⁶

- Pertama, penelitian dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan, yakni di Desa Wisata Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
- Kedua, penelitian dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lainnya. Perbandingan hasil wawancara dari beberapa informan ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus membangun hasil temuan yang koheren terkait dengan fenomena yang menjadi objek dalam penelitian ini.
- Ketiga, penelitian dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk dapat menunjukkan data yang valid dan komprehensif sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

I.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mengidentifikasi pola dan tema dari sudut pandang partisipan.¹⁰⁷ Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang tidak dapat melakukan analisis data pada saat yang bersamaan dengan pengumpulan data, metode penelitian kualitatif menghendaki peneliti untuk dapat melakukan analisis data bersamaan dengan pengembangan bagian-bagian lain. Seperti diantaranya yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *Ibid.*, Hal. 269.

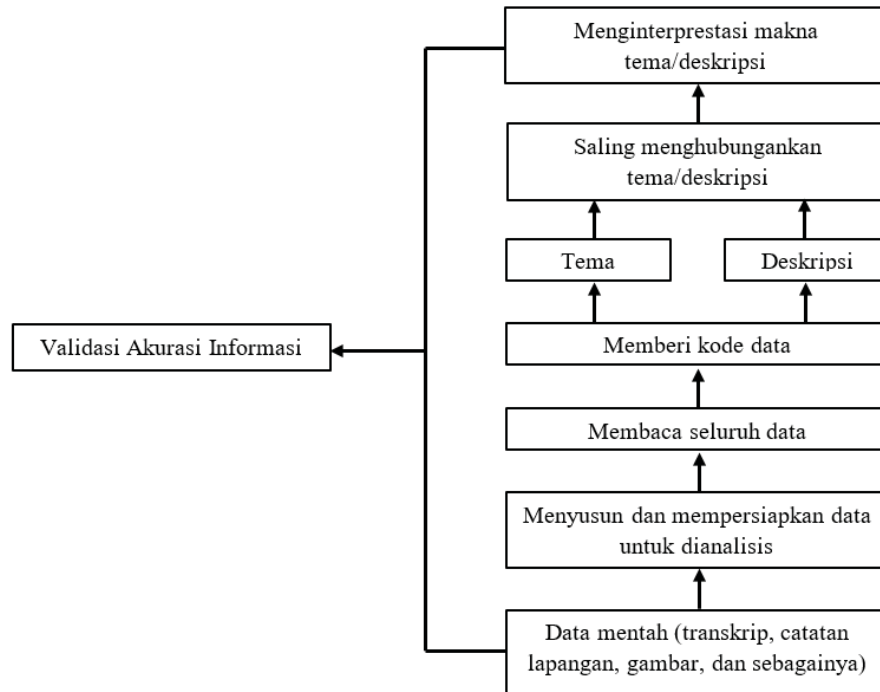
¹⁰⁶ Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. SAGE Publications Inc.

¹⁰⁷ Creswell. *Loc. Cit.*, Hal. 281.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hal. 260.

Secara lebih lanjut, Creswell melihat analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga menuju tataran umum sebagaimana yang tercermin dalam Gambar I.6 sebagai berikut.

Gambar I.6 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif



Sumber: Creswell (2016:263)

Pendekatan analisis data seperti yang tampak pada gambar I.6 di atas dapat diuraikan dalam langkah-langkah analisis sebagai berikut.¹⁰⁹

- a. Pertama, mengolah dan mempersiapkan data. Langkah ini mencakup aktivitas transkripsi wawancara, *scanning* materi, dan menggolongkan data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Kedua, membaca data secara keseluruhan untuk membangun pemahaman umum atas informasi yang diperoleh. Pada langkah ini, peneliti menulis catatan/gagasan umum tentang data yang diperoleh.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hal. 263-268.

- c. Ketiga, memberi kode (label) pada data. Langkah ini mencakup aktivitas pengambilan data yang telah dikumpulkan, segmentasi data ke dalam beberapa tema tertentu, dan pemberian label pada setiap tema dengan istilah khusus.
- d. Keempat, membuat deskripsi pada setiap tema. Deskripsi tersebut memuat informasi secara detail tentang *setting* (ranah), orang (partisipan), ataupun peristiwa untuk dianalisis lebih lanjut.
- e. Kelima, menyajikan data (tema dan deskripsi) ke dalam laporan dengan menggunakan pendekatan naratif. Penyajian data juga dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, ataupun bentuk visualisasi lainnya. Hal tersebut dirancang untuk mengumpulkan informasi secara terorganisir dalam bentuk yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.
- f. Keenam, membuat interpretasi data. Interpretasi ini berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang terkandung dalam literatur (kajian teori). Sehingga, peneliti dapat menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau menyanggah informasi pada literatur tersebut.

Proses analisis data sebagaimana yang telah diuraikan pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yang berkenaan dengan program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun berdasarkan perspektif *governance capacity*.

I.7.7 Rincian Data yang Dikumpulkan

Guna menjawab rumusan masalah secara empiris, maka diperlukan adanya pengumpulan data yang relevan dengan konteks penelitian, yakni terkait program pengembangan Desa Wisata Mendak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti telah merencanakan pengumpulan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Berikut ini merupakan rincian data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini.

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
2. Surat Keputusan Bupati Madiun Tentang Destinasi Wisata Kabupaten Madiun.

3. Peraturan Desa Mendak Tentang Pengembangan Desa Wisata.
4. Peraturan Desa Mendak Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
5. Surat Keputusan Kepala Desa Mendak Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
6. Daftar Isian Potensi Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
7. Daftar Tingkat Perkembangan Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten.
8. Daftar Prestasi Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
9. Dokumen Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Perhutani KPH Lawu Ds, LMDH, dan BUMDes Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mendak (RPJMDes) Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021-2026.
11. Rincian Anggaran Program Pengembangan Desa Wisata Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.